

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah sebuah proses atau suatu aktivitas yang berlangsung untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam tingkah laku manusia”, hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta”.¹

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) manusia. Pendidikan juga merupakan salah satu hak asasi manusia.² Karena semua manusia berhak untuk mendapatkannya. Pendidikan sebenarnya merupakan hasil dari aktualisasi implementatif dari manusia itu sendiri terhadap kebutuhan dasar dari emosi untuk memahami dan mengetahui sesuatu. Dengan demikian tidak mungkin pendidikan berdiri sendiri tanpa adanya keterlibatan makhluk yang berakal ini.

Banyak definisi yang merumuskan tentang pendidikan. Definisi pendidikan menurut orang-orang Yunani, lebih kurang 600 SM, sebagaimana dinyatakan oleh Bashori Muchsin dan Abdul Wahid, bahwa pendidikan ialah “usaha manusia untuk menjadi manusia”.³ Ada dua kata yang penting dalam kalimat itu, pertama “usaha” dan kedua “manusia”. Manusia perlu berusaha agar menjadi manusia. Jadi, seseorang dapat dikatakan telah menjadi manusia bila telah memiliki nilai (sifat) kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa tidaklah mudah menjadi manusia. Jadi, tujuan mendidik ialah memanusiaikan manusia. Agar tujuan itu dapat dicapai dan agar program dapat disusun maka ciri-ciri manusia yang telah menjadi manusia itu harus jelas.

¹Ali Anwar Yusuf, *Studi Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 32.

²M. Yunus Firdaus, *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 7.

³Bashori Muchsin dan Abdul Wahid, *Pendidikan Islam Kontemporer*, h. 2.

F.J. Mc Donald memberikan pengertian pendidikan sebagai berikut:
“*education is a process or an activity which is directed at producing desirable changes in the behaviour of human being*”.⁴

“*Pendidikan adalah suatu proses atau suatu aktivitas yang mana adalah diarahkan pada memproduksi perubahan diinginkan di (dalam perilaku manusia). Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk memotivasi, membina, membantu, serta membimbing seseorang untuk mengembangkan segala potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang lebih baik. Inti dari pendidikan adalah usaha untuk pendewasaan manusia seutuhnya (lahir dan batin), baik oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri, dalam arti tuntutan yang menuntut agar anak didik memiliki kemerdekaan berpikir, merasa, berbicara dan bertindak, serta percaya diri dengan penuh rasa tanggungjawab dalam setiap tindakan dan perilaku kehidupannya sehari-hari*”.⁵

Hasan Langgulung mengatakan bahwa pendidikan juga merupakan produk atau warisan kebudayaan dan nilai-nilai budaya baik yang bersifat intelektual, keterampilan, keahlian dari generasi tua kepada generasi muda, agar masyarakat tersebut dapat memelihara kelangsungan hidupnya atau tetap memelihara keperibadiannya.⁶

Mustofa al-Ghulayani dalam karyanya kitab *Iddatun Nasyi'in*, mengatakan bahwa Pendidikan adalah menanamkan akhlak yang mulia dalam jiwa anak didik dan menyiraminya dengan petunjuk dan nasihat, sehingga menjadi tabiat jiwa yang membuahkan keutamaan, kebaikan serta rasa cinta bekerja yang berguna bagi tanah air.⁷

Pendidikan, sebagai usaha dan kegiatan manusia dewasa terhadap manusia yang belum dewasa, bertujuan untuk menggali potensi-potensi agar menjadi aktual dan dapat dikembangkan.⁸ Pendidikan adalah alat untuk memberikan rangsangan agar potensi manusia berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan berkembangnya potensi-potensi itulah manusia

⁴F. J. Mc Donal, *Educational Psychology*, (California: Wadsworty, 1959), h. 4.

⁵Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 16.

⁶Hasan Langgulung, *Kreatifitas dan Pendidikan Islam Analisa Psikologi dan Falsafah*, Cet I, (Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1991), h. 36.

⁷Mustofa al-Ghulayani, '*Iddatun Nasyi'in*', (Beirut: Maktabah Asyriyah li al-Tab'at wa al-Nasyr), h. 185.

⁸Sudirman, *Ilmu Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987), h. 4.

akan menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya. Disinilah, pendidikan sering diartikan sebagai upaya manusia untuk memanusiakan manusia. Sehingga mampu memenuhi tugasnya sebagai manusia dan menjadi warga Negara yang berarti bagi suatu negara dan bangsa.⁹

Pendidikan memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan dan menunjang satu sama lainnya. Hal demikian dapat dilihat dari adanya interaksi dalam kegiatan belajar. Interaksi yang terjadi antara anak didik dengan lingkungan pendidikannya, baik itu dengan guru, teman-temannya, tutor, media pembelajaran dan atau sumber-sumber belajar yang lain dari komponen pembelajaran itu sendiri. Dalam pembelajaran tersebut terdapat komponen-komponen sebagai berikut; tujuan, materi/bahan ajar, metode dan media, evaluasi, anak didik/ siswa, dan adanya pendidik/guru.¹⁰

Pendidikan dapat terjadi melalui interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Proses interaksi tersebut akan berlangsung dan dialami manusia selama hidupnya. Interaksi manusia dalam lingkungan sosialnya menempatkan manusia sebagai makhluk sosial. Yakni, makhluk yang saling memerlukan, saling bergantung, dan saling membutuhkan satu sama lain, termasuk ketergantungan dalam hal pendidikan. Di samping itu, manusia sebagai makhluk sosial terikat dengan sistem sosial yang lebih luas. Dalam sistem itu didukung oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki dan diyakini oleh masyarakat yang bersangkutan. Keterikatan itu menempatkan manusia menyatu dengan nilai-nilai yang sifatnya universal. Karena itu, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang mempunyai kesadaran moral dan keagamaan.

Sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tidak dapat dipisahkan dari sistem kehidupan sosial yang lebih luas. Artinya, sekolah itu harus mampu mendukung terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Dalam pendidikan sekolah, pelaksanaan pendidikan diatur secara

⁹Azzumardi Azra, *Esai-esai Intelektual Muslim Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), h. 3.

¹⁰ Riyana, 2007. "Komponen Pembelajaran". www.kurtek.upi.ac.id.

bertahap atau mempunyai tingkatan tertentu. Dalam sistem pendidikan nasional, jenjang pendidikan dibagi menjadi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Masing-masing tingkatan itu mempunyai tujuan yang dikenal dengan tujuan institusional atau tujuan kelembagaan, yakni tujuan yang harus dicapai oleh setiap jenjang lembaga pendidikan sekolah. Semua tujuan institusi tersebut merupakan penunjang terhadap tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Karena suatu sistem didukung oleh nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat universal sehingga manusia disebut makhluk yang memiliki kesadaran moral dan keagamaan. Di Indonesia sangat diperhatikan hal menyangkut keagamaan tersebut setelah kemerdekaan sampai sekarang hal ini dapat digambarkan dalam fase-fase pemerintahan mulai pemerintahan diawal kemerdekaan sampai saat ini, dalam rumusannya termaktub didalamnya pendidikan agama.

Setelah Proklamasi kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, langkah pertama pemerintahan Republik Indonesia (RI) dalam bidang pendidikan adalah dengan mengeluarkan 'Rencana Usaha Pendidikan dan Pengajaran'. Dalam Rencana Usaha Pendidikan dan Pengajaran tersebut, Pasal 31, 32 dan 33 UUD 1945 dijadikan sebagai pedoman pertama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pendidikan. Atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), tertanggal 29 Desember 1945, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan membentuk Panitia Penyelidikan Pendidikan yang salah satu produknya adalah sistem pendidikan dan kurikulum Sekolah Menengah Pertama.

Pada bulan Desember 1946, pemerintah mengeluarkan peraturan bersama antara dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP & K) yang menetapkan bahwa pendidikan agama mulai pada Kelas IV sampai Kelas VI Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar). Situasi keamanan di zaman revolusi yang tidak stabil membuat SKB kedua menteri tersebut tidak dapat dilaksanakan. Daerah-daerah di luar Jawa masih banyak yang memberikan pendidikan agama mulai kelas I SR. Untuk

itu pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama pada tahun 1947, yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen Pendidikan & Pengajaran dan Prof. Drs. Abdullah Sigir dari Departemen Agama. Tugasnya mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum.¹¹

Pendidikan agama perlu sekali ditegakkan melalui RUUSPN pasal 13, ayat 1a, paling tidak ada beberapa alasan. *Pertama*, pendidikan agama secara konseptual merupakan konsekuensi logis dari filosofi pendidikan yang dipilih dan wujud individu yang dicita-citakan. Dalam melakukan inovasi pendidikan, Arthur K. Ellis dan Jeffrey T. Fouts¹² menegaskan bahwa ketiga riset (Riset 1, 2, dan 3) harus menunjukkan konsistensi. Yang dimaksud ketiga riset tersebut, yaitu di antaranya: Riset 1 merupakan riset murni yang diorientasikan untuk merumuskan individu yang dicita-citakan, Riset 2 merupakan riset terapan yang diorientasikan untuk menghasilkan sistem pendidikan, dan Riset 3 menunjukkan Riset terapan yang diorientasikan untuk menghasilkan operasional pendidikan. Dengan demikian bahwa tidaklah mungkin kita dapat mewujudkan insan yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, kalau tidak ada sistem pendidikan yang menjamin adanya pendidikan agama, serta pelaksanaan pendidikan agama yang utuh. *Kedua*, pendidikan agama secara legal formal, merupakan tuntutan dalam merealisasikan UUD 1945 pasal 31, ayat 3 yang berbunyi bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. *Ketiga*, pendidikan agama secara HAM, menekankan bahwa untuk setiap anak didik dijamin keberlangsungan kehidupan agamanya oleh beberapa Konvensi Internasional, sehingga tak ada alasan sedikitpun bagi setiap anak didik untuk dibebaskan dari pendidikan

¹¹H. A. Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia: 1999), h. 124.

¹²Ellis, Arthur K. and Fouts, Jeffrey T, *Research on Educational Innovations*, (New York, 1993).

agama.¹³ *Keempat* pendidikan agama wajib diberikan oleh guru yang seagama, karena kehidupan beragama tidaklah mungkin dapat dibentuk hanya melalui transfer pengetahuan agama saja, melainkan sangat dibutuhkan transfer nilai dan transformasi perilaku beragama. Kondisi yang demikian hanya akan dapat dijangkau oleh guru seagama yang mampu mendemonstrasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. *Kelima*, pendidikan agama di sekolah memberikan jaminan terjadinya transformasi nilai-nilai agama secara kontinyu dalam perjalanan kehidupan beragama bagi setiap individu.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagamaan. Hal ini tercermin dalam dijadikannya Pancasila sebagai falsafah dan ideologi Negara. Falsafah ini juga disepakati bersama untuk dijadikan sumber nilai atau rujukan dalam menetapkan aturan-aturan dalam pengelolaan Negara itu sendiri. Dalam Pancasila yang dijadikan sebagai sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ditempatkannya Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama menunjukkan bahwa hal pertama yang harus diperhatikan dalam ideologi Negara Indonesia adalah aspek keimanan. Dengan demikian, sudah seharusnya aspek keimanan menjadi tujuan dalam pendidikan nasional.¹⁴

Pendidikan agama yang dulunya hanya dipelajari di luar lembaga pendidikan formal yakni dipelajari di madrasah-madrasah atau pesantren-pesantren non formal, terasa amatlah penting untuk berada dalam pendidikan formal. Hal tersebut diamatkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional saat ini yakni, Pendidikan keagamaan atau pendidikan agama merupakan materi ajar yang wajib disampaikan disemua jenjang pendidikan, mulai dari TK

¹³Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik: Ditetapkan dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A(XXI) 16 Desember 1966, berlaku 23 Maret 1976....Pasal 4: ayat 1: "Negara akan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa orang-orang yang termasuk kaum minoritas dapat melaksanakan hak asasi dan kebebasan-kebebasan dasar mereka dengan sepenuhnya dan efektif tanpa diskriminasi, dan dengan kesamaan seutuhnya di hadapan hukum.

¹⁴Mansur Ramli *Pendidikan Keimanan, Ketakwaan dan Akhlak Mulia di Sekolah*, Makalah di sampaikan dalam seminar pendidikan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia di Universitas Gajah Mada Tanggal 14 Agustus 2007, h.12.

sampai ke Perguruan Tinggi. Pendidikan agama penting diterapkan dalam diri setiap insan dimulai dari buaian sampai ke liang lahad. Dalam konteks pendidikan formal pendidikan agama berperan aktif dalam menentukan keperibadian yang bukan hanya siswa, tetapi juga kepada unsur pendidikan lain. Pada umumnya agama mengajarkan hal yang positif. Karena agama merupakan tuntunan hidup manusia.

Pendidikan agama akan membentuk sikap utama yang harus dimiliki seseorang yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Sikap demikian akan mewujudkan sikap yang tercermin dalam fungsi pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Faktor lingkungan juga memiliki peran yang sangat penting bagi pendidikan agama di sekolah. Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa kunci pendidikan terletak pada pendidikan agama di sekolah/madrasah, sedangkan kunci pendidikan agama di sekolah/madrasah terletak pada pendidikan agama di rumah tangga.¹⁵ Hal ini disebabkan karena setiap manusia dilahirkan di dunia membawa fitrah. Arifin, mengatakan bahwa fitrah adalah suatu kemampuan dasar perkembangan manusia yang dianugerahi Allah kepadanya. Di dalam fitrah tersebut terdapat aspek-aspek psikologis yang saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Aspek-aspek tersebut antara adalah; *pertama*, kemampuan dasar¹⁶ yang dibawa sejak lahir oleh manusia dan berkembang secara menyeluruh menuju ke arah tujuan tertentu; *kedua*, kompetensi dasar¹⁷ yang bersifat dinamis, responsif terhadap pengaruh

¹⁵Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islami* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya , 2008), cet. VIII. h. 187.

¹⁶Kemampuan dasar meliputi: 1). Kemampuan dasar untuk beragama selain atheis (anti-Tuhan); 2). Bakat dan tendensi atau kecenderungan yang mengacu kepada keimanan kepada Allah *swt*: 3). Naluri dan kewahyuan. 4). Tidak terdapat komponen psikologis apapun karena fitrah diartikan kondisinya yang suci.

¹⁷Kompetensi dasar tersebut meliputi: 1). Bakat yang beranggotakan kekuatan rohani (kognisi, emosi dan nalar). 2). Insting atau *garizah* merupakan kemampuan berbuat atau tingkah laku tanpa melalui proses belajar; 3). Nafsu dan dorongan-dorongannya; 4). Karakter atau tabiat yang terbentuk oleh kekuatan dalam; 5). Hereditas atau keturunan yang mengandung psikologis dan fisiologis yang diturunkan atau diwariskan oleh orang tua; 6). Intuisi yang merupakan kemampuan psikologis manusia untuk menerima ilham dari Tuhan.

lingkungan sekitar, termasuk pengaruh lingkungan.¹⁸ Oleh karena itu imam al-Zarnuzi dalam kitabnya *Ta'lim al-Muta'alim* dalam (Achmad sunarto "Etika Menuntut Ilmu") bab tentang memilih ilmu, guru dan teman dan ketabahan. Di dalamnya terdapat syair yang maknanya:

عن المرء لا تسل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدى
فإن كان ذا شر فجنبه سرعة وإن كان ذا خير فقارنه تهتدى
لا تصحب الكسلان في حالته كم صالح بفساد آخر يفسد
عدوى البلید إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد

"Bila kamu akan mengetahui keadaan seseorang kamu tidak usah bertanya kepadanya, tetapi cukuplah kamu lihat temannya; sebab dengan teman ia akan ikut.* Bila temannya orang jahat, maka hindarilah segera. Bila temannya adalah orang baik, maka bersahabatlah dengannya, niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk dan lebih ekstrim lagi syair berikut yang maknanya: Janganlah kamu bersahabat dengan pemalas dalam segala perilakunya; Banyak orang baik menjadi rusak karena ulah orang lain.* Menjalarnya orang yang jahat terhadap orang baik itu cepat sekali; Bagaikan padamnya bara api yang diletakkan di atas abu."¹⁹

Nilai-nilai pendidikan agama seharusnya diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran umum. Akan tetapi, pada kenyataannya sebagian nilai-nilai pendidikan agama masih berjalan sendiri tidak bersamaan dengan materi umum, kurangnya kontekstualisasi pembelajaran agama terhadap kondisi politik, sosial kemasyarakatan sehingga melahirkan peserta didik yang jauh dari penghayatan nilai-nilai agama yang merupakan nilai kehidupan dalam keseharian. Indikatornya terlihat jelas bahwa masih banyak hal terjadi di kalangan masyarakat luas pada umumnya dan di sekolah pada khususnya, seperti: pergaulan bebas, tawuran, geng motor, narkoba, bolos sekolah, pembunuhan, tidak fokus pada pembelajaran, tidak menghormati guru. Menurut Ahmad tafsir tidak menghormati guru mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap peserta didik. Lanjutnya anak yang tidak

¹⁸Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 48-52.

¹⁹Achmad Sunarto, *Etika Menuntut Ilmu*, (Bandung: Husaini, 1422 H), h. 30.

menghormati guru apalagi guru agama sama dengan tidak menghormati agama, rasa hormat murid lebih penting dari metode pembelajaran gurru.²⁰ Sangat disayangkan pula hal demikian didukung lagi dengan banyak alumni pesantren atau santri yang melakukan korupsi²¹ dan juga tayangan televisi yang semakin semberaut tidak mendidik, tayangan asusila sering ditampilkan di media cetak dan elektronik.

Maraknya radikalisme (kekerasan) yang dikaitkan dengan agama menurut beberapa fakta yang dimunculkan di media. Hal ini membuat semakin resah masyarakat, karena pendidikan agama yang diharapkan untuk membentuk perilaku yang baik buat generasi penerus bangsa ini kemudian, namun semakin diperdaya dengan persoalan yang sangat urgen ini. Bahkan hal ini akan menghancurkan generasi penerus kita dimasa mendatang, jika tidak diatasi sedini mungkin. Dan dampaknya bukan hanya kepada masyarakat di perkotaan akan tetapi sampai ke daerah pinggiran dan hal ini lah yang sangat dikhawatirkan. Karena budaya tradisional di perkampungan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, seperti gotong royang, silaturahmi dan saling menghormati antara suku, ras dan pemeluk agama ini akan terkikis. Hal ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia, juga sempat terjadi di daerah timur Indonesia yaitu ambon, papua dan Maluku Utara.

Maluku Utara dengan luas wilayah mencapai 140.255,32 km². Wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km² (76,27%). Sisanya seluas 33.278 km² (23,73%) adalah daratan. Dimekarkan dari Provinsi Maluku melalui Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat kemudian, diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara

²⁰Ahmad Tafsiir, *Ilmu Pendidikan Islami* (Bandung : PT Remaa Rosdakarya Offset, 2012), h. 223-224.

²¹Lihat <http://syarifhidayatsantoso.wordpress.com/2013/05/13/amerika-dan-korupsi-kaum-santeri/>, lihat juga <http://tinnajer.blogspot.com/2013/01/presiden-pks-ternyata-lulusan-pesantren.html> lihat juga <http://www.rochim.net/2012/10/pendidikan-pesantren-mencetak-santri-16.html>.

Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895). Daerah ini pada mulanya adalah bekas wilayah empat kerajaan Islam terbesar di bagian timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku). Masing-masing adalah Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate.

Daerah ini merupakan daerah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan dalam sendi kehidupannya sehari-hari. Hal ini terlihat dalam semboyangnya "*marimoi ngone future*" (Bahasa daerah: dapat diartikan bersatu kita teguh/kuat), ini memiliki makna yang sangat luas. Diantaranya dapat berarti bahwa dalam kehidupan berinteraksi sehari-hari baik antar individu, keluarga, masyarakat, suku bangsa dan agama haruslah dijunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan atau persatuan.

Penduduk yang beragam jenisnya, yakni suku, ras, etnis, budaya, agama dan lainnya membuat daerah ini dari dahulu hingga sekarang masih terpelihara kerukunan sosialnya. Prinsip kerukunan kekeluargaan ini digambarkan dalam suatu mitos sebagaimana yang tercantum dalam Hikayat Ternate yang ditulis oleh Naidah pada abad ke-19. Menurut mitos, yang menjadi raja empat kerajaan tersebut merupakan keturunan seorang ulama dari Timur Tengah bernama Jafar Sadek yang menikah dengan seorang bidadari, setempat Nur Sifa²². Keempat sultan ini selalu bersatu karena konon merupakan saudara kandung satu sama lainnya, ini merupakan salah satu ikatan emosional yang kuat dalam menghadapi dan menyelesaikan segala bentuk persoalan baik di dalam daerah maupun di luar yang datang dari penjajah.

Dalam sejarahnya, daerah ini dikenal dengan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah karena merupakan daerah yang dikelilingi lautan maka tentunya memiliki potensi perikanan dan terumbu karang dan juga hasil lainnya, dalam pertanian juga memiliki berbagai

²²Syahril Muhammad, *Keragaman Budaya Di Maluku Utara (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Sejarah)* file: internet di unduh pada tanggal 21 Januari 2017.

komoditi pertanian yang sangat banyak, daerah ini dikenal dengan penghasil rempah-rempah (pala, cengkeh dan lainnya). Hal ini membuat orang-orang asing silih berganti mendatangi daerah ini untuk menguasai sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah ini. Kondisi ini menjadi cikal bakal kerukunan keempat kerajaan tersebut mulai pecah dan berubah menjadi persaingan ketika Portugis dan Spanyol datang di Maluku Utara. Pada tahun 1512, Ternate bekerjasama dengan Portugis sementara Tidore bekerjasama dengan Spanyol pada masa itu sebelum kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi kondisi demikian mulai kembali normal setelah kemerdekaan.

Dalam tatanan kehidupannya dimulai lagi selalu memegang nilai-nilai kebersamaan, kekerabatan, dan persaudaraan atau dapat disebut dengan kerukunan sosial. Kerukunan sosial dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang kondusif yang dimanifestasikan dalam bentuk hubungan antar individu atau kelompok dengan bahu membahu atau dengan bersama-sama tanpa memandang suku, ras bahkan agama dalam mencapai suatu tujuan bersama untuk kemaslahatan. Sikap gotong royong, toleransi dan silaturahmi merupakan bagian penting sebuah kerukunan sosial dan ini yang sering terlihat dimasyarakat perkampungan di setiap daerah. Sikap seperti ini jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang dikatakan telah mapan dan maju sudah mulai terkikis oleh perkembangan zaman yang mungkin lebih mengutamakan sikap individual. Padahal manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi antar sesamanya. Hubungan antara manusia dalam masyarakat ditata dalam tatanan normatif yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat tersebut yang disebut norma atau nilai yang menjamin terwujudnya harmoni dalam bentuk kedamaian dan ketenteraman.

Kerukunan sosial masyarakat Maluku Utara dalam kesehariannya merupakan wujud dari ikatan kebudayaan dan adat istiadat yang dibangun berdasarkan nilai-nilai keberagamaan. Tentunya ini sangat dipengaruhi dari usaha berbagai pihak baik pemerintah pusat, daerah, akademisi, ormas-ormas kepemudaan dan kemasyarakatan, tokoh-tokoh agama, kesadaran masyarakat dan yang tidak kalah penting adalah pemimpin adat (sultan) yang memegang

peranan penting dalam menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat dan budaya.

Berbagai aktifitas masyarakat dari dahulu hingga sekarang selalu dilakukan dengan bekerja sama atau gotong royong dalam aktifitas sosial kemasyarakatan berupa perkawinan, kematian, pembangunan rumah penduduk, pembangunan sarana umum seperti tempat ibadah dan lainnya, kegiatan hari besar keagamaan, kenegaraan, kedaerahan, dalam membangun pertanian di darat maupun di laut dalam aktivitas nelayan. Kesemuanya merupakan kearifan lokal budaya dan adat istiadat bahkan agama yang mengandung nilai-nilai kerukunan sosial.

Mata pencaharian masyarakat Maluku Utara di masa lalu pada umumnya adalah petani dan nelayan. Petani umumnya berada pada masyarakat yang tinggal di perbukitan atau pedalaman, sementara nelayan digeluti oleh masyarakat pesisir yang tinggal dekat pantai. Sebagai suatu contoh manifestasi kearifan lokal budaya yang mengandung nilai-nilai kerukunan sosial masyarakat, misalnya di bidang pertanian dan perikanan. Pada suku Tidore khususnya pada masa lalu dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga dalam bidang pertanian serta perikanan dikenal istilah *gololi* (kelompok tani), *galasi* (pekerja pertanian), *tulamo* (ketua/pemimpin kelompok) dan *pajeko* (kelompok nelayan). *Gololi* (kelompok tani), *galasi* (perkerjaan perkebunan atau pertanian) dan *Tulamo* (ketua kelompok), yang dibentuk secara alamiah dari kelompok masyarakat petani. Aktifitas dari kelompok ini adalah saling bahu membahu atau bergotong royong dalam membuka lahan pertanian, menanam bibit pertanian, merawat (membersihkan) lahan setelah di tanami, memanen hasil. Pekerjaannya dilakukan secara bergiliran dari satu anggota kelompok ke anggota lainnya yang diatur atau ditentukan oleh *tulamo* (ketua/pemimpin) dengan mempertimbangkan skala prioritas dan dipatuhi oleh semua anggota kelompok dan menariknya adalah tanpa dipungut biaya atau gratis. Alat-alat yang digunakan juga masih sederhana dan masih dengan alat seadanya seperti *kula/kuda-kuda* (sejenis panco kecil), *peda/parang* (pedang) dan

tamao/tomako (kampak) pada saat itu karena pertaniannya juga masih tradisional. Walaupun pekerjaannya dilakukan secara bersama-sama tetapi kepemilikan lahan dan hasilnya tetap menjadi milik individu kelompok masing-masing.

Kelompok petani ini dalam satu desa atau perkampungan terdiri dari beberapa kelompok tani yang jumlah anggota tiap-tiap kelompok puluhan orang tanpa ada batasan khusus tergantung kebutuhan dan kesepakatan bersama. Kelompok ini juga sekali-kali dipakai jasanya untuk membantu petani yang lain yang tidak bergabung dalam kelompok tersebut, akan tetapi sudah masuk dalam pekerjaan sampingan dari kelompok itu yang tentunya berbeda perlakuannya karena ada perlakuan bayar jasa kelompok apabila terjadi di luar anggota kelompok. Sedangkan dalam bidang nelayan disebut *pajeko* (kelompok nelayan) dan aktivitas melautnya dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok dengan menggunakan *bodi* (perahu motor), dengan keadaan alat pancing *nilon* (kail), *gomola/gomala* (mata kail), dan *soma/jala* (pukat) yang masih tradisional, untuk mendapatkan hasil laut kemudian dibagi-bagi kepada anggota kelompoknya secara gratis demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Dalam keadaan sekarang ini *gololi* ini sudah jarang di jumpai karena perkembangan teknologi moderen serta persaingannya dan kondisi tertentu, membuat masyarakat sekarang lebih memilih bekerja di bidang lain seperti pertukangan, pedagang, pengusaha, pegawai swasta, PNS, TNI, Polri. Walaupun ada kelompok tani atau kelompok nelayan sistem bekerjanya sudah mulai berubah dengan peralatan yang digunakan juga sudah moderen dan lebih mengarah kepada sistem bisnis.

Kondisi kerukunan sosial sebagai kearifan lokal masyarakat yang masih tampak saat ini terjadi hampir di seluruh wilayah Maluku Utara yaitu tradisi, membantu dalam perkawinan dalam bentuk *liyan* (kerja-kerja fisik) seperti mengambil kayu bakar, dan kebutuhan dapur lain, mendirikan *sabua* (tenda) di halaman rumah kalau tidak menggunakan tenda dalam bentuk tenti yang

di sewa, maupun materi (uang) dalam bentuk *sadaka* (sedekah) ketika berkunjung ke rumah yang berhajat secara suka rela; tradisi lain juga seperti melayat orang sakit; melayat orang yang meninggal juga di samping *liyan* ada kelompok yang di sebut *kampula* (kumpulan) dibentuk oleh masyarakat untuk membantu keluarga anggota-anggota kelompoknya yang menimpa musibah kematian (meninggal dunia), dengan membawa *garo/dati* yaitu barang-barang berupa sembako, kayu bakar, perlengkapan jenazah berupa kain kafan, kapas, papan dan peralatan untuk pemakaman maupun sejumlah uang, yang telah disepakati bersama dan ini bersifat mengikat wajib bagi setiap anggotanya, serta juga mengadakan tahlilan pada setiap malam di rumah duka dengan tujuan mendo'akan yang meninggal ini berlangsung selama sepuluh hari pertama, kemudian sepuluh berikutnya, sampai setahun dan bahkan ada yang lebih.

Tradisi ini dinamakan dina seperti tradisi yang di lakukan di daerah lain di Indonesia pada suatu musibah kematian ada dina dihari-hari ganjil; ada juga kelompok yang disebut *bari/babari* (gotong royong) dalam pembangun rumah ibadah atau fasilitas umum lain diluar bantuan pemerintah dalam sistem proyek murni, seperti bantuan pemerintah dalam pembangunan fasilitas umum dengan bentuk pemberdayaan seperti program PNPM baik perkotaan dan perdesaan, maupun rumah penduduk. Bahkan untuk membantu pembangunan rumah masyarakat kurang mampu ada sebuah organisasi paguyuban yang bernama IKT (Ikatan Keluarga Tidore) yang berlokasi di Ternate yang dibentuk beberapa tahun lalu, dengan program *bari fola* (gotong royong dalam membangun rumah) telah berhasil membangun rumah beberapa warga kurang mampu di Kota Ternate dengan gratis dan biayanya di tanggung oleh anggota organisasi tersebut. Pembangunan rumah dimulai dari keluarga kurang mampu yaitu keluarga Tidore yang ada di Ternate, selanjutnya kepada masyarakat lain seperti bugis, buton, makassar dan lainnya yang berdomisili di Ternate tanpa melihat latar belakang suku, ras dan agama.

Masyarakat Maluku Utara memang memiliki berbagai macam budaya kemasyarakatan dari tiap suku atau etnis, baik yang tampak di kehidupan keseharian yang dapat di lihat secara kasat mata dan dapat di tulis maupun yang tidak terlihat karena tidak ditulis juga karena banyak suku dan etnis yang mendiami wilayah ini yang memiliki adat dan budaya masing-masing. Akan tetapi yang penting di cermati di sini adalah kerukunan sosialnya dalam bentuk gotong royong yang tinggi tanpa mengenal suku, ras, golongan dan agama.

Dalam hal keagamaan di Maluku Utara data kementerian agama provinsi Maluku Utara pada tahun 2015 bahwa agama yang dianut oleh masyarakat yakni, Islam, Kristen (Katolik dan Protestan), Budha, Hindu yang tersebar di 10 Kabupaten Kota dengan penduduk mayoritas memeluk agama Islam sebanyak 991.706 jiwa, protestan 337. 778 jiwa, katolik 59.007 jiwa, hindu 126 jiwa, budha 131 jiwa.

Dengan kondisi Islam pemeluk agama mayoritas akan tetapi, kerukunan sosial seperti yang telah digambarkan di atas tetap terpelihara, dan saling menghargai antara satu agama dengan lainnya. Hal tersebut dapat terlihat dalam masyarakat hidup saling berdampingan antara satu agama dengan agama lainnya.

Dalam memupuk kebersamaan itu pada kegiatan keagamaan suatu komunitas agama sering dikunjungi atau di hadiri oleh komunitas agama lain. Hal ini bukan berarti mengakui kesamaan semua agama, akan tetapi lebih kepada silaturrahim antar sesama dan rasa menghargai serta menghormati. Dalam hal ini sebagai manifestasi nilai-nilai keberagaman oleh suatu pemeluk agama yaitu menjalin ukhuah.

Agama sebagaimana ungkapan Nurcholish Madjid, tetaplah sebagai sebuah ajaran moral yang mencintai nilai-nilai dasar kemanusiaan. Karena itu agama tidak bisa dituduh sebagai motivator penggerak perilaku menyimpang. Yang bisa dikenakan tuduhan teroris, radikal atau ekstrim adalah pemeluk agama itu sendiri. Dan itu bukan monopoli pemeluk agama tertentu. Seperti yang disampaikan oleh Faisal Ismail bahwa terorisme, brutalisme, anarkisme

dan segala bentuk kekerasan lainnya sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan ajaran agama (Islam).²³ Gerakan-gerakan radikal dan ekstrim bisa terjadi pada pemeluk setiap agama yang ada.²⁴

Jika tidak ada agama apapun yang mengajarkan kekerasan, dan bahkan radikalisme sangat kontradiktif dengan semua agama, faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya gerakan-gerakan radikal berbau agama? Mengapa suatu kelompok menindas, membunuh, dan menganiaya kelompok lain atas nama agama? Tidak mudah menjawabnya.

Mencari faktor di luar agama seperti sosial, politik, ekonomi sebagai pemicunya sangat mungkin, tapi berusaha mengelak untuk tidak mengaitkan radikalisme dengan agama sebagaimana dipahami pemeluknya bukan hal yang mudah, karena dalam realitas fenomena tersebut mudah dijumpai. Sebagaimana pendapat Mun'im A. Sirry, radikalisme agama tidak pernah terjadi di ruang hampa atau dalam situasi vakum, selalu ada sebab dan sasaran.²⁵

Radikalisme agama seringkali muncul sebagai reaksi atas aksi sebelumnya yang dipandang merugikan agama dan penganutnya. Contoh kasus pemuatan 12 kartun Nabi Muhammad saw oleh surat kabar Denmark *Jyllands-Posten* yang mendapat reaksi keras umat Islam sedunia karena isinya sangat melecehkan Nabi Muhammad dan agama Islam.²⁶ Kemarahan

²³Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama, Konflik, Rekonsiliasi dan Harmonisasi*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 12.

²⁴Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan*, (Jakarta : Paramadina, 1998), h. 254-255.

²⁵Mun'im A. Sirry, *Membendung Militansi Agama; Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 30.

²⁶Kartun Nabi Muhammad saw ini sebenarnya dimuat pada bulan September 2005. Tapi reaksi keras umat Islam baru muncul serentak di awal tahun 2006. Di antara isi kartun tersebut, Nabi digambar sebagai seorang lelaki berjenggot panjang, bersorban bom, memegang pedang dengan diapit dua perempuan bercadar di belakangnya. Sebenarnya bukan kali ini saja upaya Barat membuat citra negatif tentang Nabi Muhammad. Pada tahun 2002, sebagaimana dilaporkan Fareed Zakaria dalam kolom regulernya di *Newsweek*, 21 Oktober 2002, yang berjudul *Time to Take on America's Haters*, Jerry Falwell menyebut Nabi Muhammad sebagai teroris (*Muhammad was a terrorist*). Demikian pula Pat Robertson menyebut beliau sebagai penyamun dan perampok (*Muhammad a robber and abrigand*).

umat Muhammad pun semakin tak terbandung karena, dengan dalih kebebasan berekspresi, pemerintah Denmark tidak mau meminta maaf.²⁷

Dengan demikian sangatlah memprihatinkan generasi ini nanti jika sampai terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan apa lagi hal ini direspon oleh masyarakat yang telah terkena dampak langsung dari persoalan ini seperti bagian timur Indonesia. Maluku Utara pada tahun 1999 merupakan salah satu wilayah yang sempat dikejutkan dengan persoalan kekerasan ini yang merugikan masyarakat luas. Persoalan yang mulanya bisa diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan yang sesuai dengan budaya masyarakat Maluku Utara, kondisinya dipolitisir dengan persoalan kepentingan sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab dan dimunculkan sebagai isu sara.

Sementara pendidikan, yang diharapkan akan menjadi sebuah proses penanaman nilai-nilai moral keagamaan dan persaudaraan dalam meleraikan gejala konflik-konflik yang terjadi kini semakin memprihatinkan. Pada kenyataannya sekarang pendidikan di SMA kurang memperhatikan tugas perkembangan remaja. Pendidikan yang sekarang banyak dibangun telah jauh dari kehidupan masyarakat. Mayoritas hidup sebagai "menara gading" dan hidup secara eksklusif. Ini semata-mata bertujuan menuntaskan kurikulum, mengatur siswa dan mempersiapkan suasana persekolahan yang nyaman dan populer sehingga lulusannya semakin banyak. Pendidikan justru menjadi masyarakat khusus pelajar yang tidak mencerminkan kehidupan masyarakat besar dan hanya sedikit sekali, bekerjasama dengan masyarakat. Itupun terbatas pada studi tentang lingkungan dan kewarganegaraan.

Padahal seharusnya pendidikan yang baik dan efektif merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari guna menyelesaikan persoalan ini. Dan pendidikan agama yang harus ditingkatkan kualitas pendidikannya. Walaupun upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan

²⁷Menurut kartunis kenamaan Christoffer Zieler, surat kabar *Jyllands-Posten* telah menggunakan standar ganda dalam kasus pemuatan kartun Nabi Muhammad, karena kartun-kartun Christoffer yang bertemakan Yesus pernah ditolak untuk dimuat dalam surat kabar tersebut dengan alasan akan menyinggung perasaan umat kristiani. Baca Jawa Pos, 10 Pebruari 2006.

masih belum optimal, meskipun dari segi payung hukumnya telah memadai dengan adanya Undang-undang Dasar 1945 Bab XI, Ayat 1 dan 2 tentang agama, yaitu: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya serta lebih khusus tentang pendidikan agama yakni Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2007. Akan tetapi sudah merupakan keharusan untuk menyelenggarakan suatu pendidikan yang berkualitas maka perlu memperhatikan beberapa komponen pendidikan.

SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan dan SMA Kristen Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran agama baik dalam bentuk mata pelajaran atau materi maupun dalam bentuk program kegiatan kurikuler atau ekstra kurikuler.

Berdasarkan studi pendahuluan peneliti di lapangan, di SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terdapat materi-materi yang berhubungan dengan Kerukunan Sosial yakni pada Bab VII Kelas X materi tentang Demokrasi dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Bab IX Kelas XI materi tentang Toleransi Sebagai Alat Pemersatu Bangsa dan Bab IX Kelas XII materi tentang Persatuan dan Kerukunan.

Diluar materi pembelajaran, kegiatan harian yang dilakukan SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan meliputi berdo'a bersama sebelum memulai kegiatan dan shalat Dzuhur berjamaah sebelum pulang sekolah di Musholah Sekolah yang melibatkan siswa, guru dan pegawai.

SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan juga menyelenggarakan kegiatan hari besar Islam, yang diisi dengan kegiatan perlombaan keagamaan. Kegiatan sosial kemasyarakatan bernuansa keagamaan lain juga dilakukan meliputi bhakti sosial dan penggalangan dana.

Sedangkan SMA Kristen Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen terdapat materi-materi yang berhubungan dengan kerukunan sosial yakni pada Kelas X Bab X materi

tentang Persahabatan, Kelas XII Bab VII materi tentang Hidup bersama orang yang berbeda iman dan Bab VIII –XII materi tentang Demokrasi.

Kegiatan keagamaan di SMA Kristen Tobelo Kabupaten Halmahera Utara yang rutin dilakukan adalah do'a bersama sebelum memulai pembelajaran. Kegiatan keagamaan dan sosial lain juga dilaksanakan yakni perayaan hari besar keagamaan, bakti sosial menyelenggarakan pembersihan tempat ibadah dan pembersihan lingkungan sekolah.

Kegiatan yang dilaksanakan di dua sekolah tersebut merupakan manifestasi dari rencana besar sekolah yang termuat dalam visi dan misi, tujuan dan kurikulum yang dirancang di sekolah.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka penulis merasa terdorong untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang pendidikan agama yang fokus penelitiannya adalah “PENDIDIKAN AGAMA DAN KERUKUNAN SOSIAL” (Studi tentang Sistem Pendidikan Agama dan Keterkaitannya dengan Kerukunan Sosial pada SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan dan SMA Kristen Tobelo Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara).

B. Perumusan Masalah Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa tujuan Pendidikan Agama di SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan dan SMA Kristen Tobelo Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara?
2. Bagaimana kurikulum Pendidikan Agama di SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan dan SMA Kristen Tobelo Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara?
3. Bagaimana proses Pendidikan Agama di SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan dan SMA Kristen Tobelo Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara?

4. Bagaimana evaluasi Pendidikan Agama di SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan dan SMA Kristen Tobelo Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara?
5. Bagaimana Keterkaitan Pendidikan Agama dengan Kerukunan Sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam dan menganalisis tentang:

- a. Tujuan Pendidikan Agama di SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan dan SMA Kristen Tobelo Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.
- b. Kurikulum Pendidikan Agama di SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan dan SMA Kristen Tobelo Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.
- c. Proses Pendidikan Agama di SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan dan SMA Kristen Tobelo Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.
- d. Evaluasi Pendidikan Agama di SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan dan SMA Kristen Tobelo Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.
- e. Keterkaitan Pendidikan Agama dengan Kerukunan Sosial.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna secara teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta secara praktis dalam realisasinya di dunia pendidikan. Kegunaan lain juga adalah:

- a. Bagi peneliti sebagai sumbangsi ilmiah dan menambah khasanah keilmuan
- b. Manfaat penelitian ini bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan KotaTidoreKepulauandan Dinas Pendidikan

Halmahera Utara Maupun Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara sebagai rekomendasi evaluasi pada sekolah.

- c. Bagi Kepala sekolah dan guru agar dapat melihat persoalan ini sebagai persoalan yang urgen.
- d. Bagi siswa agar dapat membantu mereka dalam memahami pendidikan Agama dan penerapannya secara benar.
- e. Bentuk apresiasi positif penulis dalam berkarya juga bentuk pertanggungjawaban dalam mengeksplorarisasikan ilmu yang didapatkan semenjak melanjutkan studi pada program pascasarjana di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian-penelitian berfungsi sebagai pendukung dan pembanding dalam penelitian. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada korelasinya dengan penelitian ini, yakni:

1. Penelitian Kunawi Basyir²⁸. Tahun 2014. Dengan judul *Harmoni Sosial Keagamaan Masyarakat Multikultural (Studi Tentang Konstruksi Sosial Kerukunan Umat Beragama Islam-Hindu di Denpasar Bali)*. Disertasi UIN Sunan Ampel, Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu KeIslaman. Temuan dan simpulannya sebagai berikut: 1). Dalam rangka meneguhkan kembali kerukunan antarumat beragama (Hindu-Islam) masyarakat Denpasar Bali sepakat untuk menghidupkan kembali tradisi yang pernah dikembangkan oleh nenek moyang mereka yaitu tradisi *menyamabraya*. Tradisi ini dikembangkan melalui pola-pola sebagai berikut: Pertama, jalur politik, untuk meneguhkan kembali kerukunan antarumat beragama Pemerintah Kota Denpasar mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti Peraturan Gubernur Bali

²⁸Kunawi Basyir, "Harmoni Sosial Keagamaan Masyarakat Multikultural (Studi Tentang Konstruksi Sosial Kerukunan Umat Beragama Islam-Hindu di Denpasar Bali)", Disertasi-UIN Sunan Ampel, Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Ke Islaman, Surabaya 2014.

tanggal 16 Juli 2008, Nomor 32 tahun 2008 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Denpasar dengan mengeluarkan Surat Keputusannya Nomor 8 tahun 2009 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan keputusan WaliKota Denpasar nomor 188.45/76/HK/2009 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Denpasar. Di samping kebijakan bersifat tertulis seperti (Peraturan-peraturan dan Surat-Surat Keputusan) Pemerintah Daerah bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti FKUB, FKAEN, PHMB, Ulama, Umara dan juga bersama desa pakraman mengadakan dialog-dialog secara rutin dan berkesinambungan. Kedua, melalui jalur budaya. Masyarakat Denpasar adalah bagian daripada Bali, sedang Bali adalah identik dengan budaya lokalnya, maka untuk membangun kerukunan antarumat beragama, pemerintah bersama masyarakat menghidupkan kembali budaya lokalnya yaitu budaya *menyama braya*. Ketiga, melalui jalur sosial, keragaman budaya di Denpasar merupakan sebuah keniscayaan, maka untuk menjaga keberadaan kerukunan antar umat beragama selama ini masyarakat Denpasar membangunnya melalui lembaga pendidikan dan juga jejaring sosial (LSM). Lembaga pendidikan misalnya, beberapa yayasan yang berbasis Islam seperti MTs Miftahul Ulum di kampung Jawa, SMP Muhammadiyah di kampung Kapaon, mereka mencoba membangun pendidikan berbasis pluralisme dan multikulturalisme. Sedang jejaring sosial seperti: Forum Komunikasi Antar Etnis Nusantara (FKAEN), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Persaudaraan Hindu-Muslim Bali (PHMB). Tujuan dari forum-forum tersebut tidak lain adalah untuk menjaga dan melestarikan tradisi *menyama braya* dalam kaitannya dengan kerukunan antarumat beragama di daerah setempat. 2). Kokohnya kerukunan antarumat beragama Islam-Hindu di Denpasar Bali sebagaimana tersebut di atas adalah berkat adanya peran masyarakat serta beberapa institusi yang ada

seperti institusi Pemerintah, Lembaga-Lembaga Sosial, Lembaga-Lembaga Politik, Lembaga-Lembaga Keagamaan, Lembaga-Lembaga Adat dan juga masyarakat setempat. Mereka menjalin komunikasi yang intensif antar mereka sehingga budaya *menyama braya* selalu melekat pada masyarakat Denpasar pada umumnya. Dalam hal ini peran media jugatidak bisa kesampingkan seperti media elektronik maupun media cetak selalu mensosialisasikan budaya *menyama braya* yang ada di Bali. Seperti TV Bali, Bali Pos dan buletin-buletin maupun spanduk di jalan-jalan sepanjang Kota Denpasar Bali. 3). Realitas sosial mengenai kerukunan antar umat beragama Islam-Hindu di Denpasar Bali terkonstruksi melalui tiga momen yaitu: Pertama, eksternalisasi, pada momen ini, *menyama braya* dikonstruksi dengan cara menyesuaikan diri terhadap sumber-sumber kitab suci, intrepertasi ulama dan intelektual terdahulu. Sehingga gagasan dan praktik toleransi antarumat beragama memiliki landasan kesejarahan, ajaran-ajaran serta nilai-nilai yang menjadi tekanan dari ajaran kitab sucinya. Karena *menyama braya* merupakan agenda *civil society*, maka konsep toleransi antar umat beragama diberikan makna dan dikembangkan secara dinamis melalui dialek wacana yang berkembang dalam konteks sosial, politik dan budaya pada semua lapisan masyarakat Kota Denpasar Bali. Kedua, obyektivasi, pada momen ini, *menyama braya* dikonstruksi dengan cara menyesuaikan diri dengan tradisi-tradisi yang sudah mapan untuk disesuaikan dengan instrumen-instrumen yang dihasilkan oleh para ulama (Islam), *pinisepuh* (Hindu) dan para intelektual untuk menciptakan kesadaran masyarakat dalam memahami dan menghargai suatu perbedaan. Dalam memelihara dan mempromosikan nilai-nilai *menyama braya* di Denpasar Bali menampilkan gambaran yang beragam, artinya ada yang bersifat responsif dan ada juga yang bersifat diam (*silent majority*). Sikap responsif terhadap usaha penegakan nilai-nilai *menyama baraya* dalam bentuk toleransi antar umat beragama banyak diwakili oleh unsur struktural (pemerintah), lembaga sosial

maupun oleh lembaga keagamaan yang ada. Sedang sikap diam (*silent majority*) terhadap usaha penegakan nilai-nilai *menyama baraya* dalam kaitanya dengan toleransi antar umat beragama di Denpasar Bali muncul pada kelompok pemahaman dan sikap keberagamaan yang eksklusif baik dari kalangan Hindu maupun Islam. Ketiga, momen internalisasi. Pada momen identifikasi dengan sosiokultural ini biasanya mereka mengacu pada nash-nash kitab sucinya. Karena adanya perbedaan kemampuan pemikiran keagamaan, metodologi penafsiran dan perbedaan tempat serta budaya yang mengitarinya, maka gagasan untuk mengimplementasikan *menyama braya* dalam kaitannya dengan toleransi antar umat beragama akan menjadi berbeda. Sehingga pada varian ini dimungkinkan akan terjadi gesekan-gesekan yang berujung pada ketegangan yang sulit didamaikan.

2. Penelitian Sufanti. Tahun 2019. Dengan judul *Model Pendidikan Toleransi Kehidupan Beragama Melalui Apreosiasi Biografi Tokoh*. Disertasi, Penelitian ini secara keseluruhan direncanakan dalam waktu tiga tahun berturut-turut. Tahun pertama dilaksanakan tahun 2013. Kegiatan pada tahun I adalah menggali persepsi dan pemahaman siswa SMA Muhammadiyah 1 dan 2 Surakarta terhadap toleransi kehidupan beragama dan radikalisme. Di samping itu, pada tahun I juga digali persepsi siswa tersebut mengenai penanaman nilai toleransi kehidupan beragama di SMA Muhammadiyah 1 dan 2 Surakarta, penerapan prinsip-prinsip nilai toleransi dalam kehidupan beragama oleh siswa tersebut. Penelitian pada tahun pertama ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi dan penerapan nilai toleransi kehidupan beragama di kalangan siswa. Tujuan ini dirinci: Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data data yang berupa informasi tentang persepsi siswa siswa tentang toleransi kehidupan Bergama dan radikalisme, penanaman nilai-nilai toleransi, dan penerapan prinsip-prinsip toleransi digali dengan wawancara dan angket. Subjek penelitian ini adalah siswa SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dan SMA Muhammadiyah 2

Surakarta, berjumlah 97 siswa. Teknik validasi data dalam penelitian ini adalah triangulasi metode. Data dianalisis dengan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian ini dipaparkan sebagai berikut. menyatakan: menghargai agama orang lain. Persepsi ini sama dengan yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman agama, faktor ekonomi, fanatisme, pemaksaan kehendak, dan hancurnya pendidikan.

3. Penelitian Sabaruddin.²⁹ Tahun 2008. “Peran Pendidikan Agama Dalam Mewujudkan Interaksi Sosial Yang Kondusif Antar Siswa Beda Agama di SMAN 3 Yogyakarta”. *Jurnal Kependidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran pendidikan agama dalam mewujudkan interaksi sosial antar siswa beerbeda agama hasilnya sangat baik hal tersebut dibuktikan dengan terciptanya kerukunan sosial diantara siswa, saling bekerjasama dalam setiap kegiatan sosial keagamaan dan saling menghargai satu sama lain dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya tersebut.
4. Penelitian Sigit Dwi Kusrahmadi.³⁰ Tahun 2005. Judul tulisannya adalah “Sumbangan Pendidikan Agama Kristen Dalam Mewujudkan Watak Bangsa”. Artikel Majalah Ilmiah STII Yogyakarta Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Hasil penelitiannya menyimpulkan sebagai berikut: 1) Pendidikan Agama Kristen diharapkan menghasilkan peserta didik yang menjadi garam dan terang ditengah-tengah masyarakat yang ditekankan dalam bentuk 15 pendidikan nilai (budi pekerti atau *value education*); 2).memiliki kesadaran berani mengambil sikap positif demi masa depan bangsa yang bertujuan untuk mewujudkanwarga negara yang baik(*Good Cetizen*) dengan kriteria bersedia memberikan hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara

²⁹Sabaruddin, “Peran Pendidikan Agama Dalam Mewujudkan Interaksi Sosial Yang Kondusif Antar Siswa Beda Agama di SMAN 3 Yogyakarta (Dosen Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 3, No. 1. (Januari-Juni 2008)

³⁰Sigit Dwi Kusrahmadi. Artikel Majalah Ilmiah STII Yogyakarta Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. *Sumbangan Pendidikan Agama Kristen Dalam Mewujudkan Watak Bangsa*, (Pengajar di UPT MKU UNY Yogyakarta: 2005).

sesuai dengan profesinya masing-masing; 3). Mengintegrasikan pendidikan nilai agama kedalam seluruh mata pelajaran seperti nilai kebebasan, persamaan, persaudaraan, kesatuan (*liberty, equality, fraternity, unity*), demokrasi-demokratisasi, kebangsaan, kebhinekaan, pluralisme. Yesus sendiri merupakan tokoh pluralisme sejati, Ia sendiri telah meneladani murid-muridnya untuk mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri;4). Pendidikan pluralisme merupakan tututan yang harus ditindaklanjuti oleh setiap orang Kristen dalam rangka misi sebagai pembawa kabar damai sejahtera dan damai sejahtera dalam hidupnya. Pengajarannya sangat peduli terhadap manusia; 5). Ajaran Yesus memerintahkan agar setiap murid-Nya, mampu mengekspresikan imannya dalam kepedulian terhadap sesama manusia yang paling membutuhkan. Dengan demikian setiap pengikutnya terdorong untuk menghadirkan syalom Allah dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu hakekat iman Kristen.

5. Muhammad Aji Nugroho dan Khoiriyatun Ni'mah³¹. Tahun 2018. "Konsep Pendidikan Islam Berwawasan Kerukunan pada Masyarakat Multikultural". *Jurnal Studi Agama*, Vol. 17, No. 2. Penelitian ini menjelaskan tentang Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong menolong (ta'awun) dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama. Namun proses tersebut dalam realisasinya mengalami banyak kendala, seperti Fundamentalisme, Radikalisme, Terorisme. Sikap Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangatlah humanis dan relevan, tidak menggadaikan hal yang profan sebagai keyakinan yang dimiliki penganutnya, akan tetapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai universal sebagai pesan agama untuk senantiasa menjaga kedamaian antar sesama umat manusia, dengan menumbuhkan Toleransi, Membangun

³¹ Muhammad Aji Nugroho Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Khoiriyatun Ni'mah LP Ma'rif Mangunsari Kota Salatiga, Millah: *Jurnal Studi Agama*, Vol. 17, No. 2 (2018), h. 337-378 .

Solidaritas, Menegakkan Demokrasi, Menghindari Fanatisme dalam Beragama. Maka pendidikan Islam berwawasan kerukunan adalah pendidikan yang mampu menjadikan perbedaannya sebagai alat untuk semakin menjadi pribadi yang taat dan tidak keluar dari fitrahnya, yaitu dengan mengajarkan bagaimana cara hidup ditengah pluralitas bangsanya, agar mereka mampu hidup, baik dalam internal kelompoknya maupun eksternal kelompok lain, dapat hidup damai dengan lingkungannya, memaknai perbedaan yang secara bijaksana dan tepat.

6. Ali Mustofa³². Tahun 2020. “Pendidikan Keagamaan untuk Membentuk Kerukunan Antar Umat Beragama di Medowo Kandangan Kediri”. *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 3 No 1. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan seseorang dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan dalam kehidupan di dunia. Masyarakat Desa Medowo memiliki keberagaman agama antara lain; Islam, Hindu dan Kristen. ditengah perbedaan keyakinan yang dianut, mereka menjalankan aktifitas agama dan dalam kehidupan sehari-hari tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan keagamaan yang terjadi di desa Medowo dari masingmasing agama adalah pengajian rutin di musholla/masjid, dzikir bersama umat Islam yang diselingi dengan pengajian setiap seminggu sekali dari rumah ke rumah, setiap dusun ada TPQ (Taman Pendidikan Qur’an), pada umat Hindu ada legenan, Pasraman dan pecalang. Sedangkan umat kristen terdapat sekolah minggu di gereja, pertemuan jama’ah kerohanian setiap Kamis yaitu ibadah dari rumah ke rumah secara bergantian. Kerukunan antar umat beragama dibuktikan dengan setiap perayaan bersih desa (ulang tahun desa)

³² Ali Mustofa, “Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Urwatul Wutsqo Jombang”. *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 3 No 1 2020. hal. 14-37.

melakukan do'a bersama, pada perayaan hari raya antar umat beragama saling membantu serta gotong royong dalam pembangunan rumah, jalan raya, pemakaman, serta kerja bakti desa.

7. Umar.³³ Tahun 2019. “Hubungan Kerukunan Antara Umat Beragama dengan Pembentukan Perilaku Sosial Warga Perumahan PT Djarum Singocandi Kudus”. *Jurnal Penelitian*, Volume. 13, Nomor 1. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa kerukunan beragama bagi negara yang pluralitas, multiagama merupakan unsur utama terciptanya persaudaraan dan persaudaraan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi dan data kerukunan dan perilaku sosial warga atau komunitas yang tinggal di kompleks perumahan PT Djarum Singocandi Kudus yang sangat variatif dari segi tingkat pendidikan, sosial ekonomi, pekerjaan, dan agama yang dipeluk. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan bahwa warga perumahan PT Djarum Singocandi Kudus telah hidup rukun damai, dan penuh persaudaraan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjalannya kerukunan tersebut, di antaranya yaitu: faktor kepentingan dan faktor agama. Mereka sama-sama datang sebagai perantau yang memiliki kesadaran untuk hidup rukun, dan agama yang dipeluknya memuat ajaran-ajaran untuk hidup rukun dan damai.
8. Adeng Muchtar Ghazali, Busro. Tahun 2017.³⁴ “Pendidikan Islam dalam Dinamika Kehidupan Beragama di Indonesia”. *Jurnal Intizar*, Volume 23, Nomor 1. Tulisan ini untuk memahami realitas kehidupan beragama di Indonesia dalam hubungannya dengan proses pendidikan Islam. Masyarakat Indonesia adalah heterogen, plural, baik dari sisi etnis, budaya, dan kepegangan agama. Keragaman dalam menganut agama cenderung eksklusif, karena masing-masing memiliki keyakinan

³³ Umar. “Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Indonesia”. *Jurnal Penelitian*, Volume. 13, Nomor 1, Februari 2019.

³⁴ Adeng Muchtar Ghazali, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. *Jurnal Intizar*, Volume 23, Nomor 1, 2017.

bahwa kebenaran agamanya adalah yang paling benar (truth claim). Keharusan bertoleransi didengungkan dimana-mana, bahkan sudah menjadi kebijakan pemerintah melalui program kerukunan antar umat beragama. Sebagai muslim yang mayoritas, seringkali menjadi sasaran tuduhan “intoleran”. Islam memiliki doktrin tentang toleransi, sebagaimana ditunjukkan dalam tulisan sederhana ini. Doktrin toleransi ini perlu ditanamkan sejak usia dini, untuk menumbuhkan kesadaran bertoleransi. Toleransi adalah perilaku yang melekat dalam kepribadian setiap orang. Untuk menumbuhkan “perilaku” toleran ini, maka salah satunya melalui proses pendidikan agama Islam. Pendidikan menjadi representasi peradaban suatu masyarakat atau bangsa. Dalam konteks ini, masyarakat yang damai, aman, terbuka, saling menghargai dan menghormati perbedaan, sebagai bagian dari keberhasilan pendidikan dalam mencetak pribadi yang toleran dan beradab.

9. Mujahidil Mustaqim.³⁵ Tahun 2019. “Analisis Nilai-Nilai Toleransi dalam Kurikulum Pendidikan Agama”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XVI, No. 1. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa, sikap toleransi beragama pada hari ini merupakan permasalahan yang sangat seksi dengan daya kejut sensitifitas yang tinggi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Agama bisa menjadi ladang penyejuk batin sekaligus objek propaganda pihak-pihak tertentu untuk menghacurkan suatu peradaban. Maka artikel ini mengkaji seperti apa kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam upaya penguatan sikap toleransi beragama. Artikel ini disusun menggunakan metode library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dan konten kurikulum dalam penguatan sikap toleransi agama sudah mengakomodasi kebutuhan dan kondisi zaman hari ini. Konten kurikulum Pendidikan Agama tidak didominasi oleh konten keyakinan dan ibadah semata akan tetapi juga konten hubungan sesama manusia seperti toleransi

³⁵ Mujahidil Mustaqim Universitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XVI, No. 1, Juni 2019

agama. Kurikulum 2016 Pendidikan Agama dinilai sudah hadir untuk mengatasi persoalan intoleransi agama. Sehingga tidak hanya dikawal oleh mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan semata. Analisis kurikulum ini dilakukan dengan menelaah dari dua sudut pandang, yaitu Pertama, rasionalisasi silabus kurikulum 2016 mata pelajaran pendidikan agama. Kedua, kompetensi inti dan peta sebaran materi yang diajarkan sebagai perwujudan pembentukan sikap toleransi agama.

10. Ida Bagus Suradarma.³⁶ Tahun 2019. “Pendidikan Agama Hindu sebagai Landasan Pendidikan Moral dan Etika”. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol 3, No. 1. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pendidikan agama hindu agar dapat dijadikan landasan pendidikan moral dan etika. Metode pengumpulan data studi dokumentasi. Teknik analisis data adalah dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis pembahasan dapat disimpulkan bahwa penguatan nilai-nilai moral keagamaan dan nilai etika dapat dilakukan melalui pendidikan agama. Pendidikan agama dapat diberikan di sekolah tempat anak-anak mengenyam pendidikan dengan diharapkan akan dapat meningkatkan nilai kejujuran, kedisiplinan, dan ketaatan terhadap apa yang diajarkan oleh guru. Pendidikan agama Pendidikan agama dapat diberikan di rumah sebagai lingkungan terdekat keluarga. Pendidikan agama juga dapat diperoleh melalui pergaulan di lingkungan masyarakat. Karena melalui pendidikan agama dapat dijadikan sebagai suatu acuan dalam bertindak dan berperilaku yang baik dan beretika di dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis adalah: Semua penelitian berhubungan dengan masalah toleransi antar umat beragama yang merupakan bagian dari kerukunan sosial.

³⁶ Ida Bagus Suradarma. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol 3, No. 1, Februari 2019.

Pengembangan kerukunan antar umat beragama dilihat dari latar belakang budaya keagamaan, sosial dan politik masyarakat.

Sementara yang membedakan adalah Penelitian mereka lebih pada hubungan yang terjadi di masyarakat umum sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada penelitian dilembaga pendidikan yang difokuskan pada sistem pendidikan agama yang berkaitan dengan kurikulum sosial, pembahasannya tentang pendidikan agama dan kerukunan sosial yang meliputi tujuan, kurikulum, proses, evaluasi dan hubungan antara pendidikan agama dengan kerukunan sosial.

E. Kerangka Berpikir

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian disertasi ini, maka penulis menggunakan beberapa teori yang erat kaitannya dengan materi penelitian disertasi ini. *Grand Theory* yang digunakan adalah teori pendidikan agama, *Middle Theory* menggunakan teori toleransi serta *Applicated Theory* menggunakan teori kerukunan sosial.

1. Grand Theory (Teori tentang pendidikan agama)

a. Tujuan Pendidikan Agama menurut al-Zarnuji

Konsep pendidikan al-Zarnuji³⁷ tertuang dalam karya, Taklim al-Mutaallim. Kuitaib ini sudah diakui sebagai karya yang monumental, buku ini telah dijadikan rujukan dan bahan penelitian dalam penulisan karya-karya ilmiah, terutama dalam bidang pendidikan. Kitab ini tidak hanya digunakan oleh ilmuan muslim saja, tapi juga oleh para para orientalis dan penulis barat. Dalam kitab ini, al-Zarnuji menawarkan beberapan konsep pendidikan Islam, konsep pendidikan tersebut antara lain pengertian ilmu dan keutamaannya, niat belajar, memilih guru, ilmu, teman, dan ketabahan dalam belajar, menghormati ilmu dan ulama, ketekunan, kontinuitas, dan cita-cita luhur,

³⁷ Az-Zarnuji berasal dari kota Zarnuj, yakni sebuah kota yang menurut al-Qarasyi berada di Turki. Sedang menurut Yaqut, berada di Turkistan di sebelah sungai Tigris, yang jelas kedua kota tersebut dulunya masuk Transoxiana. Namun ada pendapat lain yang mengatakan beliau berasal dari kota Zarandj, yakni sebuah kota di wilayah Persia yang pernah menjadi ibu kota Sidjistan yang terletak di sebelah selatan Herat. Lihat, Muhammad Abdul Qadir Ahmad, *Ta'lim al-Muta'allim Thariq al-Ta'allum*, (Mesir: Kairo University, 1986), h. 10.

permulaan dan insensitas belajar serta tata tertibnya, tawakkal kepada Allah Swt., masa belajar, kasih sayang dan memberi nasihat, mengambil pelajaran, wara, (menjaga diri dari yang syubhat dan haram) pada masa belajar, penyebab hapal dan lupa, serta masalah rezeki dan umur.³⁸ Dalam buku, *The Muslim Theories of Education During The Middle Ages*, Abdul Muidh Khan menyimpulkan ketiga belas bagian tersebut dalam tiga cakupan besar, yaitu *the devision of knowledge, the purpose of learning*, dan *the method of study*.

Menurut al-Zarnuji tujuan pendidikan ada dua, yaitu pertama, tujuan akhirat, seseorang menuntut ilmu harus bertujuan mengharap ridha Allah, mencari kebahagiaan di akhirat menghilangkan kebodohan baik dari sendiri maupun untuk orang lain, menghidupkan agama, dan melestarikan Islam. Kedua, tujuan dunia, seseorang boleh memperoleh ilmu dengan tujuan untuk memperoleh kedudukan, kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar makruf nahi mungkar, untuk melaksanakan kebenaran dan untuk menegakkan agama Allah. Bukan mencari keuntungan diri sendiri, dan tidak pula karena memperturutkan hawa nafsu.

Dengan demikian niat menuntut ilmu jangan sampai keliru, misalnya belajar yang diniatkan untuk mencari pengaruh, atau untuk mendapatkan kenikmatan duniawi atau kehormatan dan kedudukan tertentu.³⁹ Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa tujuan pendidikan tersesebut baik yang bersifat ideal maupun yang bersifat praktis, mencakup nilai-nilai ideal islami, yaitu pertama, dimensi yang mengandung nilai untuk meningkatkan kesejahteraan di dunia. Kedua, dimensi yang mengandung nilai-nilai ruhani untuk kepentingan akhirat. Dimensi ini menghendaki pelajar untuk tidak terbelenggu oleh mata rantai kehidupan yang materealistis didunia, tetapi ada tujuan yang jauh lebih mulia yaitu kehidupan di akhirat. Ketiga, dimensi yang mengandung nilai yang dapat mengintegrasikan antara kehidupan dunia (praktis) dan kehidupan ukhrawi (ideal).

³⁸ Baharuddin, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), h. 52.

³⁹ Syeh Ibrahim Al-Zarnuji, *Syarh al-Ta'lim wa Muta'allim Tariq al-Ta'allum*, (Surabaya: Al-Hidayah Bankul Indah, 1367 H), h. 10-12.

Tujuan pendidikan yang terjabar mulai dari : tujuan nasional (UUD 1945), tujuan pembangunan nasional dalam sistem pendidikan nasional, tujuan institusional (dalam lembaga pendidikan), tujuan kurikuler (tiap bidang studi pelajaran/ kuliah), tujuan instruksional (standar kompetensi dan kompetensi dasar). Dengan demikian terlihat bahwa tujuan pendidikan itu semuanya bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan dari pendidikan di Indonesia adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Manusia yang mempunyai kepribadian, beretika, bermoral dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan pendidikan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya seperti yang disarikan dari UU No 20. tahun 2003, bab II, pasal 3, bahwa manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab belum terwujud.

Tujuan Menurut Zakiah Drajat, adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai.⁴⁰ Sedangkan menurut H.M Arifin, tujuan itu bisa jadi menunjukkan kepada *futuritas* (masa depan) yang terletak suatu jarak tertentu yang tidak dapat dicapai kecuali dengan usaha melalui proses tertentu.⁴¹ Meskipun banyak pendapat tentang pengertian tujuan tetapi pada umumnya pengertian itu berpusat pada suatu maksud tertentu yang dapat dicapai melalui pelaksanaan atau perbuatan.

Tujuan pendidikan menurut Kartini Kartono merupakan masalah sentral dalam pendidikan. Sebab, tanpa perumusan yang jelas tentang tujuan pendidikan, perbuatan menjadi acak-acakan, tanpa arah, bahkan bisa sesat atau salah langkah. Oleh karena itu perumusan tujuan dengan tegas dan jelas, menjadi inti dari seluruh pemikiran pedagogis dan perenungan filosofi.⁴²

⁴⁰Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 209

⁴¹Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 209

⁴²Kartini Kartono, *Pengantar Ilmu Pendidikan Teoritis*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h.

Tujuan umum pendidikan tergantung pada nilai-nilai atau pandangan hidup tertentu. Pandangan hidup yang menjiwai tingkah laku manusia akan menjiwai tingkah laku pendidikan dan sekaligus akan menentukan tujuan pendidikan manusia.

Tujuan pendidikan itu mesti berdasarkan kehendak manusia yang membuat kurikulum. Kehendak manusia, siapa pun, di mana pun sama, yaitu meghendaki terwujudnya manusia yang baik.⁴³ Jalaludin⁴⁴ mengatakan tujuan pendidikan dihasilkan dari rumusan kehendak dan cita-cita yang akan dicapai, yang menurut pertimbangan dapat memberi kebahagiaan dan makna hidup bagi manusia.

Berdasarkan uraian tujuan umum pendidikan tersebut maka Pendidikan Agama bertujuan untuk membimbing dan mengarahkan anak didik supaya menjadi kepribadian tangguh sebagai refleksi dari keimanan yang telah dibina oleh penanaman pengetahuan agama yang harus dicerminkan dengan akhlak yang mulia sehingga terwujudnya kebahagiaan hidup baik dunia dan akhirat sebagai sasaran akhir dari Pendidikan Agama itu.

b. Kurikulum Pendidikan Agama

Crow and Crow mendefenisikan bahwa kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah.⁴⁵ M. Arifin memandang kurikulum sebagai seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu system institusional pendidikan.⁴⁶

Pengertian ini masih terlalu sederhana dan lebih menitik beratkan pada materi pelajaran semata. Sesuai dengan perkembangan pendidikan, kurikulum yang semula dipandang sebagai sejumlah mata pelajaran kemudian beralih makna menjadi semua kegiatan atau semua pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan

⁴³Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islami, Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 100

⁴⁴H. Jalaludin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). h. 81

⁴⁵H. Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia. 2012), h.230. lihat juga Abuddin Natta, *Filsafat Pendidikan Islam I*, (Jakata: Logos Mancana Ilmu, 1997), h. 123.

⁴⁶H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 183

pendidikan dan berada di bawah tanggung jawab sekolah, lebih khususnya diartikan hasil belajar yang diharapkan

Zakiah Drajat memandang kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu.⁴⁷ Addamardasyi Sarhan dan Munir Kamil yang disitir oleh Al-Syaibani, bahwa kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olah raga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid-muridnya di dalam dan di luar sekolah dengan maksud menolong untuk berkembang menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan.⁴⁸

Pengertian tersebut agak lebih luas karena dipandang tidak hanya pada mata pelajaran tetapi seluruh program di dalam pendidikan. Bahkan Alice Miel, mengatakan bahwa kurikulum meliputi keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, pengetahuan, kecakapan dan sikap-sikap orang yang melayani dan dilayani di sekolah (termasuk di dalamnya seluruh pegawai sekolah) dalam hal ini semua pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan kepada siswa termasuk ke dalam kurikulum.⁴⁹

Ahmad tafsir⁵⁰ Program tersebut istilahnya dalam dunia pendidikan disebut kurikulum. Sebagus apapun tujuan tanpa dilengkapi dengan program yang benar maka tujuan itu tidak akan tercapai. Esensi kurikulum adalah program. Bahkan kurikulum ialah program dalam mencapai tujuan.

⁴⁷Zakiah Drajat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 121 Lihat Juga dalam H. Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia. 2012). Cet, ix (kesembilan), h. 231, lihat juga Hanold Alberti, *Reorganizing The High School Curriculum*, (New York: The Appleton Century Grafis, 1954), h. 12, lihat Juga D. Tanner, L. Tanner, L.T. *Curriculum Developmeni Into Practice*, (New York: MC Milian Publishing Come.1975), h. 25, lihat juga Jalaluddin dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Crrafindo Persada,1994), h. 43.

⁴⁸Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, terjemahan Hasan Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 485.

⁴⁹Ahce Miel, *Changing The Currikulum a Social Prosess*, (New York: D. Appleton Century Company, 1946), h. 10 lihat juga Romine St., *Building The High School Curriculum*, (New York: The Ronal Pres Company, 1954), h. 14, lihat Juga H. Ramayulis *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia. 2012). Cet, ix (kesembilan), h. 232

⁵⁰Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam....* .h. 99.

Pada umumnya isi program atau kurikulum adalah nama mata pelajaran. Akan tetapi tidak mesti kurikulum harus berupa nama mata pelajaran. Kurikulum boleh berupa nama kegiatan pembelajaran. Sekalipun isi kurikulum bermacam-macam akan tetapi isi kurikulum tetap berupa program dalam mencapai tujuan pendidikan.⁵¹

Tujuan dalam merancang kurikulum pendidikan guna terwujudnya manusia yang baik sudah menjadi keharusan dari setiap penyelenggara pendidikan. Isi semua kurikulum mengandung tiga pilar, yakni: Akhlak, Ilmu atau ketrampilan, seni. Akhlak (iman) menjadi *core*. Jika seorang telah memiliki ketiga itu maka orang tersebut dijamin menjadi orang yang baik. Itulah kurikulum pendidikan baik dalam arti minimal maupun maksimal. Kurikulum memiliki tiga pengertian: 1). Kurikulum merupakan sederet mata pelajaran pada suatu jenjang dan jenis sekolah; 2). Kurikulum dalam arti silabus; dan 3). Kurikulum dalam arti program sekolah. Inilah pengertian kurikulum yang paling luas yang dimaksud dengan kurikulum tatkala kita belajar Ilmu Pendidikan.⁵²

c. Proses Pendidikan Agama

Mengutip Pernyataan Dirjen Pendidikan Islam (pendis) Kementerian Agama, Muhammad Ali Ramdhani, beliau mengenalkan lima konsep dalam proses pendidikan Islam yang terangkum dalam kata IHSAN yang disampaikan saat workshop pembinaan guru Madrasah di Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu tanggal 4 November 2020.

"Kata IHSAN merupakan akronim dari integritas, humanisme, spiritualitas, adaptability, nationality," kata Ramdhani melalui siaran pers yang diterima *Republika.co.id*, Jumat (6/11).

Pertama, integritas. Artinya pendidikan Islam harus mampu menciptakan atau melahirkan alumni madrasah yang memiliki integritas. Proses pengajaran dalam pendidikan Islam tidak hanya sebatas transformasi keilmuan atau mengajarkan ilmu pengetahuan.

⁵¹Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam*.... h. 99 .

⁵²Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam*....., h. 101.

Siswa madrasah/sekolah harus memahami betul tentang eksistensi dia sebagai manusia dengan integritas yang baik. Siswa madrasah harus memahami baik tentang makna kejujuran dalam kehidupannya. Sebab nilai yang tidak bisa dipertukarkan dengan apa pun adalah nama baik, yang tereksresi dalam nilai-nilai kerukunan sosial.

Kedua, kemanusiaan. Artinya proses pendidikan yang berlangsung di madrasah harus mampu menampilkan nilai-nilai kemanusiaan. Setiap proses pengajaran di madrasah jangan sampai menjadi beban tersendiri bagi anak didik. "Jangan kita bebani anak didik kita dengan hal yang di luar kemampuan mereka. Sebab esensi dari humanisme adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai porsinya. Humanisme menjadi penyeimbang dari konsep integritas," ujarnya.

Ketiga, spiritualitas. Artinya orang yang memiliki nilai-nilai spiritual, aktivitasnya selalu diniatkan sebagai ibadah. Guru yang sadar bahwa proses dan eksistensi hidupnya adalah memberikan makna terhadap orang lain, tidak hanya memikirkan diri sendiri, maka dia memiliki nilai spiritual yang baik. "Setiap guru dalam mengajar harus selalu diniatkan sebagai sebuah ibadah. Ibadah dalam menyiapkan generasi berintegritas yang akan mengisi peradaban mendatang," jelas Ramdhani.

Keempat adalah adaptasi. Artinya kemampuan manusia untuk menyelaraskan diri dan berdialog dengan lingkungan strategis di sekitarnya, tanpa kehilangan identitasnya. Menurut Ramdhani, adaptasi harus menjadi kekuatan untuk memahami, bahwa sebuah lembaga pendidikan harus menghadirkan anak zaman. Mereka yang beribukun waktu berayahkan zaman akan menari bersama zaman untuk menarikan zaman.

Ia menjelaskan, dalam konteks pendidikan, dinamika zaman hari ini adalah kebutuhan manusia terhadap penguasaan teknologi. "Orang yang hebat pada hari ini adalah orang yang mampu membaca masa depan dengan baik. Guru yang hebat akan mampu melahirkan anak didik yang akan bisa menguasai zamannya," jelasnya.

Kelima adalah kebangsaan. Ramdhani menjelaskan, proses pendidikan madrasah harus mengajarkan kecintaan pada Tanah Air. Itu adalah bagian dari batang tubuh seorang manusia dan lembaganya. Guru dan anak didik di madrasah harus mencintai Tanah Air.

"Kita harus tanamkan kepada peserta didik bahwa mencintai Tanah Air adalah bagian daripada iman," ujarnya. Ramdhani juga menekankan kepada guru madrasah untuk terus belajar. Menurutnya, orang yang terus belajar adalah pemilik peradaban masa depan. Eksistensi belajar adalah eksistensi kehidupan, berhentinya belajar adalah berhentinya kehidupan.

Pada hakekatnya belajar merupakan proses yang dilalui oleh individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik sebagai hasil pengalaman individu berinteraksi dengan lingkungan. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dapat dilakukan melalui usaha mendengar, membaca mengikuti petunjuk, mengamati, memikirkan, menghayati meniru, melatih atau mencoba sendiri dengan pengajaran atau latihan. Adapun perubahan tingkah laku dari hasil belajar tersebut relative tetap dan tidak bersifat sementara. Tingkah laku mengalami perubahan menyangkut semua aspek kepribadian, baik perubahan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kebiasaan, sikap dan aspek perilaku lainnya.⁵³

Proses pendidikan adalah semua upaya yang digunakan dalam upaya mendidik. Dalam pedagogik disebut metode, metode dalam arti luas. Karena mengajar adalah salah satu bentuk upaya mendidik, maka metode yang dimaksud juga metode mengajar.⁵⁴ Metode itu harus dimasukkan sebagai salah satu aspek saja dalam suatu sistem mengajar. Yang dapat membantu seseorang untuk dapat mengajar bukanlah penguasaan metode-metode umum tersebut, melainkan petunjuk bagaimana merancang "jalan pengajaran" atau proses mengajar, yaitu urutan langkah mengajar (*teaching steps*), yang ditentukan oleh banyak hal diantaranya: 1). Tujuan pengajaran yang hendak

⁵³H. Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 334.

⁵⁴Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*,.....h. 195.

dicapai pada jam pelajaran itu; 2). Kemampuan guru; 3). Keadaan alat yang tersedia; dan 4). Jumlah murid.⁵⁵

Ramayulis, dalam bukunya menjelaskan bahwa proses pengajaran yang dilaksanakan mengacu pada tiga aspek penguasaan sejumlah pengetahuan, keterampilan dan pembelajaran. Pengajaran terpusat pada guru, sedangkan pembelajaran terpusat pada siswa. Proses pembelajaran tidak hanya terbatas dalam ruang saja, tetapi dapat dilaksanakan dengan cara membaca buku, belajar dikelas, atau di labor, karena diwarnai oleh organisasi dan interaksi antar berbagai komponen yang saling berkaitan, untuk membelajarkan peserta didik. Selanjutnya apabila dikaitkan dengan proses pembelajaran dalam pendidikan Agama (Islam), maka pada umumnya sama dengan proses pembelajaran umum. Yang membedakan adalah dalam pendidikan Islam proses maupun hasil belajar selalu *inheren*, dengan keIslaman; keIslaman melandasi aktivitas belajar, menafasi perubahan yang terjadi serta menjiwai aktivitas berikutnya.⁵⁶

Berdasarkan semua kegiatan tersebut dapat diikhtisarkan adanya beberapa ciri proses belajar mengajar Pendidikan Agama. Ciri-ciri tersebut terdapat pada hal-hal sebagai berikut : 1) Tujuan pendidikan Agama yang akan dicapai telah dirumuskan secara jelas, 2) Bahan ajar pendidikan agama yang akan menjadi isi interaksi telah dipilih dan ditetapkan, 3) Guru-siswa aktif dalam melakukan interaksi, 4) Pelajar dan siswa berinteraksi secara aktif, 5) Kesesuaian metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan agama, 6) Situasi yang memungkinkan terciptanya proses interaksi dapat berlangsung dengan baik, 7) Penilaian terhadap hasil interaksi proses belajar mengajar pendidikan agama.⁵⁷

d. Evaluasi Pendidikan Agama

Slameto, dalam Evaluasi Pendidikan menjelaskan bahwa evaluasi merupakan sub sistem dari sistem pengajaran yang terdiri dari: Tujuan,

⁵⁵Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*,h. 196-197.

⁵⁶H. Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*,h. 338-340.

⁵⁷Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000). h, 139.

Materi, Proses Belajar Mengajar (PBM) , Evaluasi. Selanjutnya diterangkan bahwa Materi dan PBM dirancang untuk mencapai Tujuan. Sedang evaluasi memegang peran penting yaitu untuk menjamin relevansi Materi dan PBM dan untuk mengetahui ketercapaian tujuan. Tujuan dimaksud adalah perubahan siswa kearah yang positif.⁵⁸ Lebih lanjut diterangkan bahwa syarat-syarat evaluasi ada 8 yaitu: Sahih (*valid*), keterandalan (*reliable*), obyektif, seimbang, membedakan (*discriminable*), norma, fair dan praktis.⁵⁹ Suharsimi Arikunto membahasnya pada Prinsip Evaluasi. Prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau KBM, dan evaluasi.⁶⁰

Suharsimi Arikunto dalam Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan mengemukakan evaluasi program sebagai "suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program" Selanjutnya dalam perspektif evaluasi hasil belajar, menyatakan bahwa fungsi penilaian meliputi: selektif, diagnostik, penempatan, pengukuran keberhasilan.⁶¹

Adapun sasaran evaluasi adalah *evaluasi input* meliputi: kemampuan, kepribadian, sikap-sikap, intelegensia. *Evaluasi transformasi* meliputi: kurikulum/materi, metode, sarana pendidikan/media, system administrasi, guru/personalia lain. *Evaluasi output*, meliputi: untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian/ prestasi belajar mereka selama mengikuti program dengan menggunakan achievement test.⁶²

Husein Kosasih mengemukakan bahwa evaluasi bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang

⁵⁸Slameto, *Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Bhumi Aksara; 2001), Cetakan ketiga, h, 5.

⁵⁹Slameto, *Evaluasi Pendidikan*, h, 21.

⁶⁰Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara; 2005), Edisi Revisi V, h, 24.

⁶¹Suharsimi Arikunto,, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* h, 10-11.

⁶²Suharsimi Arikunto,, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, h, 21-22.

dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.⁶³

Evaluasi dapat dipilah-pilah menurut beberapa hal, seperti menurut jenis yang dievaluasi, menurut pelakunya (evaluator), menurut lingkungannya, menurut kadar kedalamannya, menurut masa atau periodenya. Dalam Modul Akuntabilitas Kinerja, dikemukakan bahwa evaluasi dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, misalnya: evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dapat meliputi evaluasi yang dilakukan sebelum program berjalan, atau sedang dalam pelaksanaan, atau setelah program selesai dan dapat diteliti hasil dan dampaknya. Evaluasi formatif, adalah evaluasi yang dilakukan untuk beberapa periode/tahun sehingga memerlukan pengumpulan data *time series* untuk beberapa tahun yang dievaluasi.⁶⁴ Arikunto menyebutnya dengan tes formatif yaitu untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah terbentuk seperti: ulangan harian.⁶⁵ Sedang tes sumatif dilakukan setelah pemberian sekelompok program atau program yang lebih besar, seperti: ulangan umum.⁶⁶ Scriven dalam Purwanto dkk evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki program selama program tersebut sedang berjalan Caranya dengan menyediakan balikan tentang seberapa bagus program tersebut telah berlangsung. Melalui evaluasi formatif ini dapat dideteksi adanya ketidakefisienan sehingga segera dilakukan revisi. Selain itu evaluasi memberikan data yang relatif cepat (shot term data). Hasil evaluasi formatif harus diberikan pada saat yang tepat agar efektif. Evaluasi sumatif bertujuan mengukur efektivitas keseluruhan program. Mengukur dan menilai hasil akhir dari program ini bertujuan untuk membuat keputusan tentang kelangsungan program tersebut, yaitu diteruskan atau dihentikan.⁶⁷

⁶³Husein Kosasih, *Teknik Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama*, Modul Diklat KIP/LAKIP, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2004), h, 3.

⁶⁴Indonesia, LANRI, *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, *loc. cit.* h. 240

⁶⁵Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, h, 36.

⁶⁶Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, h 39

⁶⁷Purwanto, Atwi Suparman, (*Evaluasi Program Diklat*, Jakarta: Setia Lan, Press. 1999), h,

Menurut Peneliti evaluasi adalah proses membanding antara kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan yang senyatanya dapat dilaksanakan. Artinya evaluator tidak mungkin melakukan tugasnya tanpa terlebih dahulu mengetahui tentang rencana kegiatan dari suatu sasaran evaluasi dan informasi tentang realisasi dari rencana yang telah ditetapkan dalam keadaan selesai berproses.

2. Middle Theory (Teori tentang Toleransi)

Margaret Sutton dalam jurnalnya yang berjudul Nilai dalam Pelaksanaan Demokrasi mengemukakan bahwa toleransi adalah kemampuan dan kemauan orang itu sendiri dan masyarakat umum untuk berhati-hati terhadap hak-hak orang golongan kecil/minoritas dimana mereka hidup dalam peraturan yang dirumuskan oleh mayoritas. Lebih jelasnya lagi, pengertian toleransi menurut Margaret ialah sikap untuk menghargai hak-hak kaum minoritas yang hidup dalam peraturan yang dibuat oleh kaum mayoritas.⁶⁸

Berdasarkan pengertian tentang toleransi di atas, dapat disimpulkan bahwa toleransi ialah sikap menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada serta tidak melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas. Perbedaan yang dimaksud meliputi perbedaan agama, ras, suku, bangsa, budaya, penampilan, kemampuan dan lain-lain. Tujuan dari sikap toleransi ini ialah membuat tatanan dunia yang penuh dengan kedamaian, sehingga kefanatikan dan kekejaman tidak dapat ditolerir.

Toleransi ialah sikap saling menghargai tanpa membedakan suku, gender, penampilan, budaya, keyakinan, kemampuan, atau orientasi seksual. Orang yang toleran bisa menghargai orang lain meskipun berbeda pandangan dan keyakinan. Dalam konteks toleransi tersebut, orang tidak bisa mentolerir kekejaman, kefanatikan, dan rasialisme. Bentuk-bentuk sikap toleransi, antara lain:⁶⁹

⁶⁸ Margaret Sutton, *Nilai dalam Pelaksanaan Demokrasi*. Vol. 2, No. 1 tahun 2016. Diakses dari ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/viewFile/1070/902 pada hari Selasa, 4 April 2020 pukul 13.38 WIB.

⁶⁹ Pasurdi Suparlan, *Pembentukan Karakter*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 78.

1) Berlapang dada dalam menerima semua perbedaan, karena perbedaan adalah Rahmat Allah swt.

2) Tidak membeda-bedakan (mendiskriminasi) teman yang berbeda keyakinan.

3) Tidak memaksakan orang lain dalam hal keyakinan (agama).

4) Memberikan kebebasan orang lain untuk memilih keyakinan (agama).

5) Tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan ketika mereka beribadah.

6) Tetap bergaul dan bersikap baik dengan orang yang berbeda keyakinan dalam hal duniawi.

7) Menghormati orang lain yang sedang beribadah.

8) Tidak membenci dan menyakiti perasaan seseorang yang berbeda keyakinan atau pendapat dengan kita.

Bentuk-bentuk toleransi yang ada tersebut digunakan untuk menjadi acuan dalam penelitaian yang akan dilakukan. Toleransi yang ada dilokasi penelitian mengacu pada bentuk-bentuk toleransi yang sudah ada. Bentuk-bentuk toleransi untuk membentuk karakter peserta didik yang nantinya akan menjadi karakter yang baik.

Selain itu toleransi mempunyai unsur-unsur yang harus ditekankan dalam mengekspresikannya terhadap orang lain. Unsur-unsur tersebut adalah: ⁷⁰

1) Memberikan kebebasan atau kemerdekaan

Dimana setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak maupun berkehendak menurut dirinya sendiri dan juga di dalam memilih suatu agama atau kepercayaan. Kebebasan ini diberikan sejak manusia lahir sampai nanti ia meninggal dan kebebasan atau kemerdekaan yang manusia miliki tidak dapat digantikan atau direbut oleh orang lain dengan cara apapun. Karena kebebasan itu adalah datangnya dari Tuhan YME yang harus dijaga dan dilindungi. Di setiap negara melindungi kebebasan-kebebasan setiap manusia baik dalam Undang-Undang maupun dalam peraturan yang ada. Begitu pula dalam memilih satu agama

⁷⁰ Maskuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2001), h. 13.

atau kepercayaan yang diyakini, manusia berhak dan bebas dalam memilihnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

2) Mengakui Hak Setiap Orang

Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan sikap perilaku dan nasibnya masing-masing. Tentu saja sikap atau perilaku yang dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain, karena kalau demikian, kehidupan di dalam masyarakat akan kacau.

3) Menghormati Keyakinan Orang Lain

Landasan keyakinan di atas adalah berdasarkan kepercayaan, bahwa tidak benar ada orang atau golongan yang berkeras memaksakan kehendaknya sendiri kepada orang atau golongan lain. Tidak ada orang atau golongan yang memonopoli kebenaran dan landasan ini disertai catatan bahwa soal keyakinan adalah urusan pribadi masing-masing orang.

4) Saling Mengerti

Tidak akan terjadi, saling menghormati antara sesama manusia bila mereka tidak ada saling mengerti. Saling anti dan saling membenci, saling berebut pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling mengerti dan saling menghargai antara satu dengan yang lain.⁷¹

Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun.

3. **Applicated Theory (Kerukunan Sosial)**

Upaya yang dilakukan untuk memunculkan kesadaran dalam beragama, setidaknya diperlukan beberapa tahapan, yaitu pengetahuan dan pemahaman, praktek, dan dilakukan secara berulang-ulang. Ketiga tahapan ini merupakan satu kesatuan dalam perilaku. Dalam konteks kerukunan dan toleransi, maka tahapan-tahapan ini harus dilalui. Setiap tindakan pasti berdasarkan pengetahuan dan

⁷¹ Maskuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan...*, h..202.

pemahamannya. Jika tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang, maka akan melekat menjadi suatu kepribadian. Baik tidaknya suatu tindakan tergantung pengetahuan dan pemahaman yang diperolehnya. Orang yang beragama adalah orang yang mempraktekan ajaran agama berdasarkan pengetahuan, pemahaman dan kesadarannya.

Mengikuti alur pikir di atas, maka pengetahuan dan pemahaman tentang keharusan hidup rukun dan toleran menjadi kunci utama. Islam mengajarkan pengetahuan ini untuk dipraktekan. Ajaran yang mengungkapkan hidup rukun dan toleran dapat dikemukakan, diantaranya beberapa poin di bawah ini.

- a. Manusia adalah makhluk sosial dan diharuskan untuk saling mengenal.

Manusia diciptakan berbeda-beda, dan perbedaan ini sudah menjadi ketetapan Tuhan (Sunnatullah). Landasan dasar pemikiran ini adalah firman Allah SWT salah satunya dalam surat Al-Hujarat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Sebagai ketetapan Tuhan, pernyataan ini tentu harus diterima. Mereka yang tidak bisa menerima adanya keragaman berarti mengingkari ketetapan Tuhan. Berdasarkan hal ini pula maka toleransi menjadi satu ajaran penting yang dibawa dalam setiap risalah keagamaan, tidak terkecuali pada sistem teologi Islam. Sudah barang tentu, adanya ragam perbedaan merupakan kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tidak dapat dipungkiri.

Makhluk sosial adalah makhluk yang satu sama lain saling membutuhkan dan memiliki kemampuan untuk berdialog dengan orang lain dan lingkungannya. Dialog merupakan percakapan antara dua orang atau lebih, juga diartikan sebagai “pergaulan antara pribadi-pribadi yang saling

memberikan diri dan berusaha mengenal pihak lain sebagaimana adanya⁷². Dari pengertian ini, secara sosiologis maupun psikologis, dialog merupakan kebutuhan hakiki. Manusia membutuhkan dialog, membuka diri kepada orang lain, dengan mendasari pada prinsip-prinsip : (a) keterbukaan terhadap pihak lain; (b) kerelaan berbicara dan memberikan tanggapan kepada pihak lain; dan (c) saling percaya bahwa kedua belah pihak memberikan informasi yang benar dengan caranya sendiri⁷³. Dialog selalu bermakna menemukan bahasa yang sama, tapi bahasa sama ini diekspresikan dengan kata-kata yang berbeda.

b. Perbedaan pemahaman maupun keyakinan tidak bisa dipungkiri.

Secara sosiologis, pengakuan terhadap adanya keragaman keyakinan ini merupakan pengakuan toleran yang paling sederhana, namun pengakuan secara sosiologis ini tidak berarti mengandung pengakuan terhadap kebenaran teologis dari agama lain seperti dijelaskan dalam al-Qur'an surat 2 ayat 251. Menurut Azyumardi Azra, dalam perspektif teologi Islam tentang kerukunan hidup antar agama, dan konsekuensinya antarumat beragama, berkaitan erat dengan dua hal, yakni *pertama*, berkaitan dengan doktrin Islam tentang hubungan antar sesama manusia dan hubungan antara Islam dengan agama-agama lain; *kedua*, berkaitan dengan pengalaman historis manusia sendiri dalam hubungannya dengan agama-agama yang dianut oleh umat manusia⁷⁴.

c. Mengikuti keteladanan Rasulullah

Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita diharuskan mengikuti keteladanannya. Perilaku Rasulullah adalah perilaku akhlak. Akhlak merupakan norma dan etika pergaulan berlandaskan Islam. Ia tidak hanya mengatur etika pergaulan antar sesama manusia, tetapi juga dengan alam lingkungan dan Penciptanya. Perilaku yang akhlaki ini semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah. Terdapat banyak sunnah-sunnah Nabi yang terkait dengan perintah bagi umatnya untuk terus menjaga sikap dan perilaku mereka agar tidak melanggar batas-batas kemanusiaan, meskipun berbeda

⁷² D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Kanisius, Yogyakarta, 1983, h. 172.

⁷³ D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, h. 172-173.

⁷⁴ Azyumardi Azra, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Antarumat Beragama : Perspektif Islam*”, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), h. 92.

dalam keyakinan. Perjanjian antara Nabi Muhammad Saw dan umat Kristen di Gunung Sinai, misalnya, adalah salah satu contoh besar dari sikap toleransi dan mengakui adanya keberagaman agama dalam masyarakat ini. Demikian pula, ketika Rasulullah menjadi pemimpin Negara di Madinah yang masyarakatnya terdiri dari beragam suku dan agama.

d. Kedamaian dan Persaudaraan Universal

Kasih dan damai merupakan jantung ajaran agama, karena merupakan kebutuhan kemanusiaan. Alquran mencoba mengembangkan moralitas tertinggi dimana perdamaian merupakan komponen terpenting. Kata 'Islam' diderivasi dari akar kata 'silm' yang berarti "kedamaian." Visi kasih dalam Islam dibangun di atas dua pilar, yaitu individu dan masyarakat. Hubungan individu-individu yang saleh dan damai akan membentuk masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang berdasarkan pada tiga pilar: keadilan politik, yang disebut dengan demokrasi; keadilan ekonomi, yang disebut dengan kesejahteraan dan pemerataan; dan keadilan sosial, yang disebut dengan persamaan dan tersedianya akses politik⁷⁵.

Islam pada esensinya memandang manusia dan kemanusiaan secara sangat positif dan optimistis. Menurut Islam, manusia berasal dari satu asal yang sama, yaitu keturunan Adam dan Hawa. Dari sinilah kemudian manusia berkembang menjadi bersuku-suku, berkaum-kaum atau berbangsa-bangsa lengkap dengan kebudayaan dan peradaban khas masing-masing. Perbedaan ini mendorong manusia untuk saling kenal mengenal dan menumbuhkan apresiasi serta respek satu sama lain. Dalam pandangan Islam, perbedaan di antara umat manusia bukanlah karena warna kulit dan bangsa, tetapi hanyalah tergantung pada tingkat ketakwaan masing-masing. Inilah yang menjadi dasar perspektif Islam tentang "kesatuan umat manusia", yang pada gilirannya akan mendorong berkembangnya solidaritas antar manusia (*ukhuwwah insaniyyah* atau *ukhuwwah basyariyyah* dan *ukhuwwah wathaniyyah*)⁷⁶.

⁷⁵Munir A. Sirry, *Membendung Militansi Agama, Iman dan Politik dalam Masyarakat Moderen*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 151.

⁷⁶Dalam Islam, istilah *ukhuwwah Islamiyyah* didalamnya mengandung pula pengertian *ukhuwwah insaniyyah* dan *ukhuwwah wathaniyyah*. *Ukhuwwah insaniyyah* berhubungan dengan

Prinsip toleransi yang diwujudkan dalam bentuk keharusan hidup rukun, dapat dilihat dalam konteks persaudaraan kemanusiaan universal ini. Semua umat manusia adalah satu keturunan. Umat Islam meyakini bahwa Adam adalah nabi dan rasul yang pertama, dan Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan rasul terakhir, dan bahkan meyakini pula bahwa “agama” nabi Adam tentulah Islam. Dalam al-Quran menyebut agama Ibrahim dan Yakub beserta keturunannya adalah Islam (Al-Baqarah 132), dan agama nabi Yusuf adalah Islam (Yusuf 101). Doktrin Islam berkaitan dengan kerukunan dapat dipahami pula dari fungsi Islam sebagai *rahmatul lil alamin*, yaitu pembawa rahmat dan kedamaian (Al-Anbiya 170).

e. Mengakui hak hidup agama lain

Pada saat yang bersamaan, Islam mewajibkan kepada para pemeluknya untuk menyampaikan pesan-pesan Islam melalui dakwah, yaitu panggilan kepada kebenaran agar manusia yang bersangkutan dapat mencapai keselamatan dunia dan akherat (Q.S. 16:125; 22:67; 41:33). Karena dakwah merupakan ”panggilan”, maka konsekuensinya adalah bahwa ia harus tidak melibatkan pemaksaan – *la ikraha fi al-din* (Q.S.2:256).

Dengan demikian jelas, Islam mengakui hak hidup agama-agama lain; dan membenarkan para pemeluk agama lain tersebut untuk menjalankan ajaran-ajaran agama masing-masing. Di sinilah terletak dasar ajaran Islam mengenai toleransi antar ummat beragama. Setelah memahami sebagian dari prinsip Islam tentang toleransi dan kerukunan, dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan menghadapi problema.

Kerangka pemikiran adalah serangkaian konsep yang menghubungkan antara substansi penelitian dengan aspek-aspek yang akan diteliti. Dalam kerangka pemikiran ini penulis akan mendeskripsikan tentang, Sistem

persaudaraan manusia secara universal tanpa memberdakan suku, ras, bangsa, agama, dan aspek-aspek kekhususan lainnya; sedangkan ukhuwah wathaniyah berhubungan dengan persaudaraan yang diikat oleh nasionalisme/kebangsaan tanpa membedakan agama, ras, adat istiadat, dan aspek-aspek kekhususan lainnya. Lihat; Wahyudin, dkk., *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Grasindo, h. 93.

Pendidikan Agama, Pendidikan Agama di SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan dan SMA Kristen Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Komponen pendidikan Agama diinternalisasikan dalam tujuan, program, standar proses, standar kelulusan atau evaluasi dan kerukunan sosial.

Sistem pendidikan nasional yang termaktub dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebagai dasar yuridis formal merupakan sebuah konsep utama dimana Negara memiliki peran penting dalam menata pendidikan dinegeri ini, agar institusi pendidikan di negeri ini memiliki landasan dan acuan yang satu dalam mengembangkannya.

Dalam memahami Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), setidaknya ada beberapa poin penting, di antaranya. *Pertama*, hakekat pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya sadar dalam mendewasakan individu sebagai co-subjek objek, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif yang memungkinkan individu dapat mewujudkan dirinya sesuai dengan fitrahnya, baik sebagai hamba Tuhan dan khalifah di atas bumi. Karena itu diupayakan jangan sampai terjadi reduksi pemahaman, sehingga hakekat pendidikan memiliki makna tidak lebih baik daripada pengajaran (*instruction*).

Kedua, bahwa sadar akan tujuan nasional, maka tujuan pendidikan nasional lebih difokuskan pada usaha membentuk manusia seutuhnya (insan kamil), yaitu manusia yang mampu menunjukkan sebagai hamba Tuhan yang memiliki jati diri dan kemandirian, sebagai makhluk Tuhan termulia yang memiliki kerukunan sosial, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi manusia lainnya, melainkan juga bagi keseluruhan lingkungan yang melingkupi dirinya. Kandungan makna di balik rumusan tujuan pendidikan nasional adalah sangat luas dan kaya, namun semuanya itu membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh untuk merealisasikannya, karena pada kenyataan historis bahwa menjabarkannya ke dalam rencana tindakan merupakan suatu pekerjaan yang sangat sulit.

Ketiga, bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu substansi yang dipandang sangat esensial dalam melandasi model sistem

pendidikan nasional yang pada UU Sistem Pendidikan Nasional sebelumnya tidak pernah ada. Dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan dirumuskan sejumlah kata, frase, dan kalimat kunci yang sangat penting dalam menegakkan dan mengembangkan penyelenggaraan pendidikan sehingga benar-benar mampu mengantarkan setiap insan manusia menjadi warga negara yang bermartabat. Beberapa prinsip yang patut diangkat, di antaranya bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif; pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna; pendidikan diselenggarakan dengan mengacu pada *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tutwuri handayani*; dan sebagainya. Namun nilai-nilai luhur yang terkandung tersebut pada kenyataannya tidaklah mudah untuk meaktualisasikannya. Untuk itu perlu upaya bersama yang sinergis dan produktif dalam mensukseskannya.

Keempat, bahwa subjek pendidikan mencakup semua anak bangsa tanpa dikecualikan oleh potensi, karakteristik, jenis kelamin, ras, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Hal ini merupakan konsekuensi logis demokrasi yang ditegakkan. Secara jujur untuk merealisasikannya yang ideal tidaklah mudah. Untuk itulah dibutuhkan suatu pengorbanan yang tulus dari semua pihak, terutama orangtua, guru, sekolah, dunia industri dan bisnis. Kelima, bahwa ketenagaan dalam melayani anak di jenis pendidikan apapun dibutuhkan tenaga yang handal dan profesional. Karena tidak sedikit ditemukan di lapangan, bahwa secara kuantitatif sudah tersedia tenaga gurunya secara memadai, namun secara kualitatif kondisi dan kinerja tenaga masih belum banyak yang memenuhi kriteria kompetensi minimal. Karena itu pembuatan program pembinaan perlu terus di kembangkan.

Sistem pendidikan nasional merupakan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara menyeluruh. Komponen pendidikan adalah semua hal yang berkaitan dengan jalannya proses pendidikan. Jika salah satu komponen tidak ada, proses pendidikan tidak akan bisa dilaksanakan.

Sementara pendidikan agama dapat dimaknai dengan proses pengembangan potensi yang dibawa sejak lahir yang disebut fitrah. Fitrah manusia secara alamiah mampu untuk mengimani Allah dan mengamalkan ajaran-Nya. Karena fitrah inilah kemudian manusia dijuluki sebagai *homo religius* (makhluk beragama) atau *homo dividian* (makhluk yang ber-Tuhan).⁷⁷ Fitrah beragama manusia merupakan kemampuan dasar (*disposisi*) yang mengandung kemungkinan untuk berkembang. Fitrah agama manusia memiliki dua kemungkinan berkembang menjadi baik atau buruk. Namun mengenai arah dan kualitasnya tergantung kepada proses pendidikan yang diterimanya.⁷⁸

Pendidikan agama di SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan dan SMA Kristen Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan berbagai komponen pendidikan yang terdapat didalamnya untuk mewujudkan suatu kondisi sosial yang kondusif (kerukunan sosial). Komponen pendidikan agama ini meliputi, tujuan, program, standar proses dan standar kelulusan atau evaluasi. Komponen pendidikan dimaksud senada dengan diuraikan oleh Ahmad Tafsir yakni, Komponen-komponen yang meliputi, Tujuan pendidikan, isi atau mata pelajaran, metode atau proses dalam kegiatan belajar mengajar dan evaluasi.⁷⁹ Dengan demikian usaha mengoptimalkan dalam implementasi penelitian tentang pendidikan agama, maka komponen pendidikan tersebut dapat dijadikan barometer atau ukuran keteraturan dan kesempurnaan penelitian peneliti.

Hakekatnya, ketika seseorang mengaku beragama maka tentunya akan mengamalkan nilai-nilai yang terkait dengan hubungannya dengan sang pencipta, hubungan antar sesama manusia, dan hubungan manusia dengan

⁷⁷Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

⁷⁸Syamsu Yusuf, *Psikologi Belajar Agama: Perspektif Agama Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 31.

⁷⁹Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*(Bandung : PT Remaja Rosdakarya , 2013), cet. II. h. 83-84; lihat juga Hamdi Abdullah, Disertasi, *Pendidikan Keimanan di Madrasah Aliyah (Penelitian di MBI Ammatul Ummah Surabaya dan Madrasah Mu'alimin Yogyakarta)*, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Program Pascasarjana, Progran Studi Ilmu Pendidikan Islam: Bandung, 2014), sinopsis, h. 15.

lingkungan sekitar. Yang pada intinya terkandung pengetahuan dapat menjaga dan melestarikan hubungan tersebut dengan baik dan benar. Karena pada prinsipnya doktrin dari agama akan mengarahkan penganutnya pada hal tersebut.

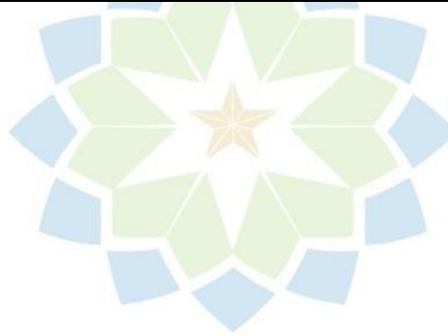
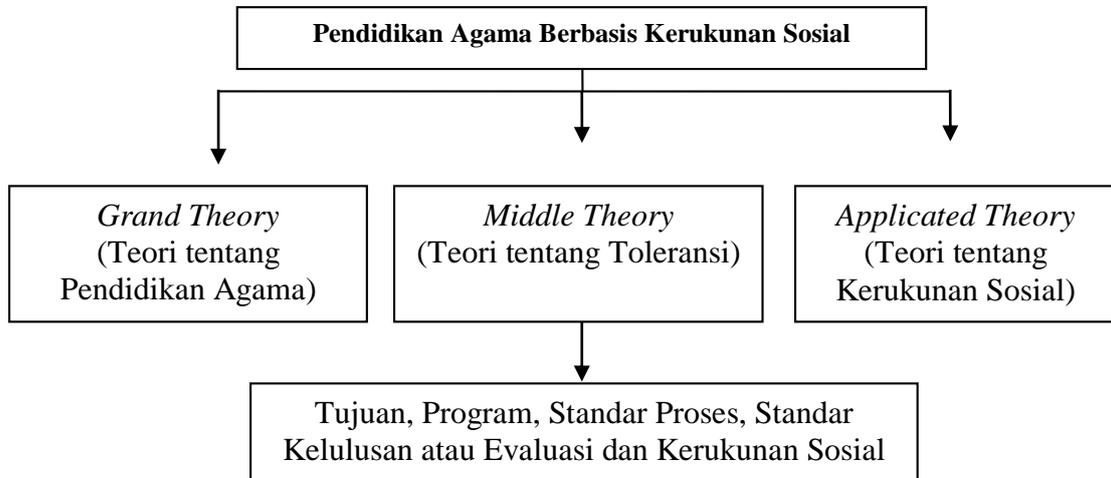
Kerukunan sosial merupakan suatu kondisi yang damai, tenteram harmonis tanpa ada ketegangan atau ancaman maupun kekerasan. Kerukunan sosial ini dapat dimanifestasikan dalam hubungan antara pemeluk agama, antara umat beragama, antar suku bangsa, ras, golongan, budaya dan lain sebagainya.

Hubungan antar penganut agama dalam Islam umpamanya berakar pada “benih” yang ditanam Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ke dalam diri manusia. Sesuatu yang tidak dapat dihindari bahwa manusia diciptakan-Nya senasib, secara kodrati ditempatkan di muka bumi ini, secara kodrati satu keturunan, diberinya suatu sifat-sifat dasar yang sama, atau dapat dikatakan bahwa banyak kesamaan “secara kodrati” antara manusia. Pengalaman paling awal manusia adalah terjadi dari rahim ibunya, dipelihara secara lahir dan bathin. Selanjutnya lahir ke dunia terus menerus dipelihara oleh ibu dengan penuh kasih sayang (dalam bahasa Arab disebut “rahim” juga), sampai remaja dan dewasa. Keturunan manusia terus berkembang secara lahiriah (*genealogis*), demikian juga hubungan kasih sayang berkembang secara rohaniyah, secara kekeluargaan dari generasi ke generasi. Hingga saat ini, ketika manusia berkembang menjadi berbagai suku, ras, bangsa, dan berbagai kelompok yang lebih kecil atau “campuran” hubungan kasih sayang (*silaturahmi*) itu tetap ada.

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan hubungan dan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual. Ajaran Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama sama dan tolong menolong (*ta'awun*) sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, suku bangsa dan agama.

Gambar 1. 1

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema sebagai berikut:



uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG